

# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN**

**Jl. Letnan Soetopo Kav. 1 No. 1 (PIH) Sektor 1.1 BSD City  
Kel. Rawa Mekar Jaya, Kec. Serpong 15318 Telp. (021) 53163644**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i	
DAFTAR ISI .....	ii	-
iii		
DAFTAR TABEL .....	iv	
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang .....	I.1	-
I.8		
1.2. Landasan Hukum .....	I.8	-
I.10		
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I.10	-
I.11		
1.4. Sistematika Penulisan .....	I.11	-
I.14		
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD		
2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		
2.1.1. Tugas .....	II.1	
2.1.2. Fungsi .....	II.1	
- II.3		
2.1.3. Susunan Organisasi		

A. Kepala Dinas .....	II.4
- II.6	
B. Sekretariat .....	II.6
- II.12	
C. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan .....	II.12
- II.18	
D. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan .....	II.18
- II.23	
E. Bidang Pertanian dan Pernakan .....	II.23
- II.30	
F. Bidang Perikanan .....	II.30
- II.34	
G. UPT dan Jabatan Fungsional.....	II.34
- II.35	
2.2. Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan	
2.2.1. Sumberdaya Manusia .....	II.35
- II.36	
2.2.2. Sumberdaya Aset .....	II.36
- II.49	
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.....	II.49
- II.60	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kota Tangerang Selatan

2.4.1. Tantangan .....	II.61
- II.64	
2.4.2. Peluang .....	II.64
- II.66	

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN  
TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan,  
Pertanian dan Perikanan

3.1.1. Dinamika Internasional	
3.1.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals</i> atau <i>SDGs</i> ).....	III.3
- III.5	
3.1.1.2. Perkembangan Konsep Pertanian Perkotaan ( <i>Urban Agriculture/</i> <i>Urban Farming</i> ).. ..	III.5
- III.7	
3.1.1.3. Perubahan Iklim ( <i>Climate Changes</i> )....	III.7
3.1.1.4. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ..	III.7
3.1.2. Dinamika Nasional	
3.1.2.1. Nawacita .....	III.8 -
III.9	
3.1.2.2. Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan .....	III.9 -
III.10	
3.1.2.3. Good Governance dan Clean	



Government .....	III.10 -
III.11	
3.1.1. Dinamika Lokal .....	III.11 -
III.13	
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih .....	III.13
- III.17	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi	
3.3.1. Kementerian Pertanian .....	III.18
- III.19	
3.3.2. Kementerian Kelautan dan Perikanan .....	III.19 -
III.21	
3.3.3. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten .....	III.21
- III.23	
3.3.4. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.....	III.23 -
III.27	
3.3.5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten .....	III.27 -
III.28	
3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan .....	III.28
- III.33	
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III.34
- III.37	
3.5 Isu Strategis .....	III.37
- III.3	

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

### KEBIJAKAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran ..... IV.1

##### - IV.2

#### 4.2. Strategi dan Kebijakan

##### 4.2.1. Analisis SWOT ..... IV.3

##### - IV.9

##### 4.2.2. Strategi ..... IV.9

##### - IV.12 4.2.3. Kebijakan

##### ..... IV.12 - IV.13

## BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN... V.I

### - V.2

## BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

### PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..... VI.1

## BAB VII. PENUTUP ..... VII.1

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Rekap Aset Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan .....	II.49
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan .....	II.50
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan .....	II.51
Tabel 2.4. Jenis Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Tangerang Selatan.....	II.61
Tabel 2.5. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan .....	II.62
Tabel 2.6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan (Miliar Rupiah) .....	II .63

Tabel 2.7. Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan .....	II.64
---	-------

Tabel 3.1. Perincian Pusat-pusat Pelayanan di Kota Tangerang Selatan .....	III.31
---	--------



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan adalah bagian dari perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan yang proses penyusunannya melalui tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam jangka waktu tahun 2016-2021. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran terhadap visi dan misi walikota terpilih dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, selain juga turut memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Renstra Dinas

Pertanian dan Peternakan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis Teknologi dan Inovasi”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Visi Kementerian Pertanian tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Untuk mencapai misi tersebut telah ditetapkan misi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Mewujudkan kedaulatan pangan
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tercantum dalam Renstra tahun 2015-2019 adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Sedangkan misinya yaitu:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten mempunyai visi tahun 2012-2017, yaitu: “Menjadi Institusi Yang Handal Menuju Mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dan Sistem Penyuluhan Yang Efektif Untuk Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera”.

Adapun misinya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat berbasis kemandirian.
2. Pengembangan distribusi pangan dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan serta mengantisipasi kerawanan pangan.
3. Pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan dan kearifan lokal serta peningkatan mutu dan keamanan pangan.
4. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur serta peningkatan koordinasi dengan stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan dan penyuluhan.

Visi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah “Mewujudkan Pertanian dan Peternakan Yang Maju dan Tangguh Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Dalam rangka pencapaian Visi di atas, maka Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, menetapkan 4 (empat) Misi, yaitu:

1. Meningkatkan Optimalisasi Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Pertanian Dan Peternakan dalam mendukung Ketahanan Pangan melalui Pengembangan dan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Peternakan di Provinsi Banten.
2. Meningkatkan kemampuan peran kelembagaan petani dan Kelembagaan usaha agribisnis serta Kualitas SDM Aparatur Pertanian dan Peternakan.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi berbasis komoditas dan sumber daya lokal dalam Meningkatkan produk pertanian dan peternakan yang mempunyai nilai tambah dan daya saing.
4. Membangun Semangat Kebersamaan Antar Pelaku Pembangunan Pertanian dan Sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selaras, serasi dan seimbang.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten mempunyai visi, yaitu: ” *Terwujudnya Usaha Kelautan Dan Perikanan Yang Maju dan Berdaya Saing Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*”. Adapun misinya, yaitu :

1. Peningkatan mutu dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang berwibawa menuju tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan;

3. Pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sektor kelautan dan perikanan;
4. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dengan Renja tahun 2016 sebagai tahun transisi Renstra tahun 2011-2016 dan Renja tahun 2021 merupakan tahun transisi Renstra tahun 2016-2021.

Renstra disusun atas dasar kesadaran adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga perlu adanya penetapan prioritas terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Penyusunan Renstra diawali dengan rumusan akhir yang ingin dicapai dan selanjutnya mundur ke situasi yang ada saat ini.

Sebagai wilayah perkotaan permasalahan utama yang dihadapi adalah terbatasnya ketersediaan sumberdaya khususnya lahan. Sebagian besar lahan diperuntukkan bagi pengembangan perumahan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung seperti pengembangan sektor jasa. Produksi sektor pertanian terutama produk pangan sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pangan di Kota Tangerang Selatan yang sangat besar, mengingat tingginya jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan. Kebutuhan pangan selama ini sebagian besar dipenuhi dari wilayah di luar Kota Tangerang Selatan maupun impor, yang tentunya sangat beresiko terhadap aspek keamanan pangan. Produk pangan umumnya bersifat *perishable* (mudah rusak) sehingga rentan penggunaan bahan pengawet dan produk pangan

yang diproduksi secara masal rentan terhadap penggunaan pestisida secara berlebih.

Kegiatan sektor pertanian di wilayah perkotaan masih dianggap sebagai hal yang kontradiktif, dimana kegiatan di sektor pertanian biasanya membutuhkan lahan luas yang tidak tersedia di wilayah perkotaan pada umumnya serta kota yang identik dengan pengembangan teknologi tinggi dan pelayanan jasa. Kegiatan-kegiatan di sektor pertanian identik dengan wilayah pedesaan.

Ketersediaan lahan yang terus berkurang untuk kegiatan di sektor pertanian juga berdampak terhadap semakin berkurangnya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Termasuk juga persepsi masyarakat usia muda yang sangat jarang untuk menggeluti sektor pertanian termasuk anak-anak petani itu sendiri. Masalah regenerasi petani ini juga merupakan permasalahan yang banyak dijumpai di wilayah-wilayah perkotaan lainnya.

Indikator semakin menurunnya aktivitas pertanian di wilayah perkotaan salah satunya terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang cenderung turun dari tahun ke tahun. Walaupun terjadi peningkatan secara nilai dan pertumbuhan yang positif namun secara persentase terus menurun dan nilai pertumbuhan selalu dibawah pertumbuhan ekonomi rata-rata daerah.

Hal-hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, bagaimana mempertahankan sekaligus mengembangkan sektor pertanian di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan lahan yang sangat terbatas melalui pengembangan konsep pertanian perkotaan (*urban agriculture* atau *urban farming*).



Pertanian perkotaan mulai berkembang sejak tahun 1980-an, di dasari kesadaran masyarakat dunia bahwa pada tahun 2030 di prediksi lebih dari 50% penduduk dunia tinggal di kota. Angka ini akan semakin besar pada tahun-tahun setelahnya. Semakin banyak permasalahan yang akan dihadapi kota seperti masalah pangan, kesehatan, lingkungan, pengangguran dan lain sebagainya.

Pertanian perkotaan bukanlah satu-satunya solusi dalam menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut, namun manfaat yang didapat dari pengembangan pertanian perkotaan dapat membantu berbagai permasalahan yang dihadapi kota. Berdasarkan perspektif kebijakan, fungsi pertanian perkotaan dapat terbagi ke dalam tiga perspektif utama yaitu perspektif sosial, perspektif ekonomi dan perspektif lingkungan. Berdasarkan perspektif sosial pertanian perkotaan dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menjamin ketahanan pangan kota, mengentaskan kemiskinan, menangani permasalahan sosial, membangun komunitas, sebagai jaring sosial dan lain sebagainya. Berdasarkan perspektif ekonomi, peran pertanian perkotaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha, mengembangkan rantai pasar dan lain sebagainya. Sedangkan peran pertanian perkotaan berdasarkan perspektif lingkungan yaitu sebagai manajemen tata ruang dan keanekaragaman hayati, memperbaiki iklim mikro kota, memanfaatkan sampah kota, rekreasi, penghijauan kota dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bersama bahwa emisi karbon terbesar saat ini berasal dari wilayah perkotaan yang saat ini dampaknya dapat terasa berupa terjadinya fenomena perubahan iklim (*climate change*). Fokus terhadap salah satu perspektif kebijakan pertanian perkotaan akan mempengaruhi strategi apa

yang akan ditempuh oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di masa mendatang yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan mulai di susun hari ini.

Renstra yang disusun merupakan pedoman pembangunan di sektor pertanian dalam lima tahun ke depan bukan hanya menjadi formalitas untuk memenuhi kewajiban Organisasi Perangkat Daerah. Tentunya dalam penyusunan Renstra ini akan diuraikan apa yang menjadi harapan dalam 5 tahun mendatang dan bagaimana cara pencapaiannya.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum Renstra SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 beserta perubahannya.
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011–2031;
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan 2005–2025.
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
23. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Tangerang Selatan. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 berisi analisa faktor-faktor eksternal dan internal, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 ke dalam tujuan

- dan sasaran strategis, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
2. Sebagai tolok ukur rencana pembangunan tahunan yang dijabarkan dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.
  3. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan memperhatikan basis potensi yang dimiliki.
  4. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

*Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.*

#### **1.2 Landasan Hukum**

*Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.*

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

*Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD*

#### 1.4 Sistematika Penulisan

*Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.*

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

*Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.*

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

*Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).*

#### 2.2 Sumber Daya SKPD

*Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.*

#### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

*Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.*

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

*Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang*



*berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.*

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

*Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada Analisis Gambaran Pelayanan SKPD.*

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

*Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.*

#### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi**

*Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi.*

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

*Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.*

#### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

*Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:*

1. gambaran pelayanan SKPD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

##### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD mengacu kepada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Rancangan RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan dari Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD.

##### **4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VII PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (sebelumnya nomenklatur dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pangan, pertanian dan kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah ditetapkan dengan Nomor 62 Tahun 2016, dengan uraian isinya sebagai berikut :

##### **2.1.1 Tugas**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

##### **2.1.2 Fungsi**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan kewenangan:

- a. pelaksanaan penanganan kerawanan pangan dan pengelolaan cadangan pangan Kota;
- b. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- c. penetapan tindak lanjut hasil pengawasan keamanan pangan segar;
- d. penetapan hasil penghitungan Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi;
- e. pelaksanaan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, produk pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengembangan penggunaan sarana/ prasarana/ sumber daya pertanian dan peternakan;
- g. pelaksanaan penerbitan rekomendasi Izin Usaha Pertanian;
- h. pelaksanaan penetapan rekomendasi Surat Izin Praktek dokter hewan;
- i. pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- j. pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan,

klinik hewan, pasar hewan, Rumah Potong Hewan serta Produk Hewan;

- k. pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer meliputi toko, retail, sub distributor obat hewan;
- l. pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan;
- m. pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan;
- n. pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- o. pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan.

### 2.1.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan :
  - 1) Subbagian Perencanaan;
  - 2) Subbagian Keuangan;
  - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan:
  - 1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - 2) Seksi Distribusi Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
  - 1) Seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan;

- 2) Seksi Keamanan Pangan.
- e. Bidang Pertanian dan Peternakan, membawahkan:
  - 1) Seksi Pertanian;
  - 2) Seksi Peternakan;
  - 3) Seksi Pasca Panen Pertanian dan Peternakan.
- f. Bidang Perikanan, membawahkan:
  - 1) Seksi Perikanan Budidaya;
  - 2) Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kepala Dinas, sekretariat, masing-masing bidang dan sub bagian/seksi adalah sebagai berikut:

#### **A. Kepala Dinas**

1. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pertanian dan Peternakan serta Perikanan;
  - b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pertanian dan Peternakan serta Perikanan;
  - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pertanian dan Peternakan serta Perikanan;
  - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Dinas;



- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pertanian dan Peternakan serta Perikanan dengan lembaga/instansi terkait;
- f. pelaksanaan penanganan kerawanan pangan dan pengelolaan cadangan pangan Kota;
- g. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- h. penetapan tindak lanjut hasil pengawasan keamanan pangan segar;
- i. penetapan hasil penghitungan Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi;
- j. pelaksanaan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, produk pertanian, peternakan dan perikanan;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengembangan penggunaan sarana/ prasarana/ sumber daya pertanian dan peternakan;
- l. pelaksanaan penerbitan rekomendasi Izin Usaha Pertanian;
- m. pelaksanaan penetapan rekomendasi Surat Izin Praktek dokter hewan;
- n. pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- o. pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, klinik hewan, pasar hewan, Rumah Potong Hewan serta Produk Hewan;
- p. pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer meliputi toko, retail, sub distributor obat hewan;
- q. pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan;

- r. pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan;
- s. pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- t. pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
- u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **B. Sekretariat**

- 1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta mengoordinasikan administrasi urusan Ketahanan Pangan, urusan Pertanian dan urusan Perikanan.
- 2. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup sekretariat dan Dinas;
  - b. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran dilingkup Dinas;
  - c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran dilingkup sekretariat;

- d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/kementerian/lembaga/instansi terkait;
- e. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggung jawaban pemerintah lingkup sekretariat dan Dinas;
- f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Dinas;
- i. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Dinas;
- j. pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- k. pengoordinasian penyusunan dan analisa kebutuhan pegawai/pengadaan barang/pemeliharaan aset Dinas/perjalanan Dinas/penyelenggaraan rapat Dinas;
- l. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan dilingkup Dinas;
- m. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di lingkup Dinas;

- n. pengelolaan barang milik Daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
- o. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Dinas;
- q. pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dilingkup Dinas kepada kepala Dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsi.

(a) Subbagian Perencanaan memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup urusan perencanaan meliputi program, evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas;
- b. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan lingkup Dinas;
- c. menghimpun/ menyusun/menganalisa/ merumuskan dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilingkup Subbagian Perencanaan dan Dinas;
- d. mengoordinir penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran meliputi

- penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- e. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Dinas;
- f. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Dinas;
- g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Subbagian Perencanaan;
- h. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan dilingkup Dinas;
- i. menghimpun/                      menyusun/menganalisa/merumuskan dokumenpelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan,triwulanan, semester dan tahunan dilingkup Subbagian Perencanaan dan Dinas;
- j. menghimpun     data dan dokumentasi serta informasi publik;

- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan;
  - l. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup Subbagian Perencanaan;
  - m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
- (b) Subbagian Keuangan memiliki tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup urusan keuangan di lingkup Dinas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
  - c. menyusun dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
  - d. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan dilingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
  - e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dilingkup Dinas;
  - f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan dilingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
  - g. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan dokumen pelaporan keuangan bulanan,



triwulanan, semester dan tahunan dilingkup Dinas;

- h. menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan dilingkup Dinas;
  - i. mengoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;
  - j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai Subbagian Keuangan;
  - k. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan;
  - l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
- (c) Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup urusan umum dan kepegawaian dilingkup Dinas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. menyusun dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - d. menyelenggarakan layanan administrasi ketatausahaan dilingkup Dinas;

- e. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dilingkup Dinas;
- f. menyelenggarakan layanan kerumahtanggaan dilingkup Dinas;
- g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dilingkup Dinas;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis dilingkup Dinas;
- i. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- j. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;
- l. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan Dinas;
- m. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas;
- p. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

### **C. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan ketersediaan dan kerawanan pangan serta distribusi pangan.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - b. perumusan perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan urusan ketersediaan dan distribusi pangan;
  - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup ketersediaan dan kerawanan pangan serta distribusi pangan;
  - f. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
  - g. pengoordinasian penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan;
  - h. pengoordinasian penanganan kerawanan pangan Kota;

- i. pengoordinasian dan pengadaan, pemeliharaan serta penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- j. pengoordinasian dan penyediaan serta penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- k. pengoordinasian dan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- l. pengelolaan cadangan pangan Kota;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- n. pelaksanaan analisis dan kajian ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya serta sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- o. pelaksanaan penyusunan Neraca Bahan Makanan, kerentanan dan ketahanan pangan;
- p. pelaksanaan penghitungan Pola Pangan Harapan ketersediaan pangan;
- q. pelaksanaan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- r. pengoordinasian ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
- s. pengoordinasian bahan intervensi daerah rawan pangan;
- t. pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- u. pelaksanaan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- v. pengoordinasian pengelolaan cadangan pangan pokok dan pangan pokok lokal;

- w. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(a) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

(1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkenaan dengan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, operasional, prosedur dan kriteria pada seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. menyusun perencanaan program dan anggaran pada seksi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan ketersediaan pangan, kerawanan pangan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup seksi ketersediaan pangan, kerawanan pangan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada seksi ketersediaan pangan, kerawanan pangan;

- f. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan Daerah;
- g. menyiapkan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- h. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan dan penghitungan Pola Pangan Harapan ketersediaan pangan;
- i. menyiapkan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- j. mengoordinasikan ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
- k. menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- m. menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kota;
- n. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
- o. melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- p. melaksanakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- q. melaksanakan penanganan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;

- r. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- s. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

(b) Seksi Distribusi Pangan

- (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkenaan dengan Distribusi Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, operasional, prosedur dan kriteria pada seksi Distribusi Pangan;
  - b. menyusun perencanaan program dan anggaran pada seksi Distribusi Pangan;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan distribusi pangan;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup seksi Distribusi Pangan;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada seksi Distribusi Pangan;



- f. menyusun data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- g. menyiapkan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- h. menyusun prognosa neraca pangan;
- i. menyiapkan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- j. menyediakan dan pengelolaan cadangan pangan pokok dan pangan pokok lokal;
- k. menyiapkan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kota;
- l. melaksanakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- m. melaksanakan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- n. melaksanakan pengelolaan cadangan pangan Kota;
- o. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Distribusi Pangan;
- p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai seksi Distribusi Pangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

#### **D. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

II-40

1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan serta Keamanan Pangan.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan urusan konsumsi dan Keanekaragaman pangan, serta keamanan pangan;
  - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup bidang Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan, serta Keamanan Pangan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dilingkup Bidang konsumsi dan Keanekaragaman pangan, serta keamanan pangan;
  - f. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
  - g. pengoordinasian pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
  - h. penyusunan penghitungan Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi dan peta pola konsumsi pangan;
  - i. pengoordinasian persiapan promosi Keanekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal, konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;

- j. penetapan hasil analisis dan kajian dalam rangka promosi Keanekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi Keanekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- m. pengoordinasian pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- n. pengoordinasian pengembangan/kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan Keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- o. pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- p. pengoordinasian sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- q. pengoordinasian Jejaring Keamanan Pangan Daerah;
- r. pengoordinasian komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- s. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai dilingkup bidang konsumsi dan keamanan pangan; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(a) Seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan

- (1) Seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, operasional, prosedur dan kriteria pada seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan;
- b. menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran pada seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan konsumsi dan Keanekaragaman Pangan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan;
- f. menyiapkan bahan dan dokumen penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun dan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- g. menyusun dokumen penghitungan Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi dan penetapan peta pola konsumsi pangan;
- h. menyelenggarakan dan memfasilitasi promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi

seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;

- i. menyusun dokumen analisis dan kajian dalam rangka promosi Keanekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- j. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi Keanekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- k. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- l. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- m. menyiapkan bahan dan dokumen pengembangan/kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan Keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- n. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan;
- o. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

(b) Seksi Keamanan Pangan

- (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkenaan dengan Keamanan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, operasional, prosedur dan kriteria pada seksi Keamanan Pangan;
- b. menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran pada seksi Keamanan Pangan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan keamanan Pangan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup seksi keamanan Pangan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada seksi Keamanan Pangan;
- f. melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar dan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- g. memfasilitas dan menyelenggarakan Jejaring Keamanan Pangan Daerah;
- h. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- i. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Keamanan Pangan;
- j. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai seksi Keamanan Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

## **E. Bidang Pertanian Dan Peternakan**

1. Bidang Pertanian dan Peternakan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Pertanian, Peternakan serta Pasca Panen Pertanian dan Peternakan.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup bidang pertanian dan peternakan;
  - b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup bidang pertanian dan peternakan;
  - c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan pertanian, peternakan serta pasca panen pertanian dan peternakan;
  - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dilingkup pertanian, peternakan serta pasca panen pertanian dan peternakan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
  - g. pengoordinasian pengembangan prasarana pertanian;
  - h. pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kota;
  - i. pengoordinasian penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
  - j. pengoordinasian pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan;



- k. pengoordinasian penyediaan, pengawasan, pengendalian mutu dan peredaran benih/bibit ternak, tanaman pakan ternak serta pakan;
- l. pengoordinasian pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- m. pemberdayaan sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- n. pengoordinasian penerbitan rekomendasi Surat Izin Praktek dokter hewan;
- y. pengoordinasian penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- o. pengoordinasian pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
- p. pengoordinasian pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- q. pengoordinasian penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- r. pengoordinasian penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, klinik hewan, pasar hewan, Rumah Potong Hewan, Produk Hewan serta pengecer meliputi toko, retail, sub distributor obat hewan;
- s. pengoordinasian persiapan promosi produk pertanian dan peternakan pasca panen;
- t. pengoordinasian pemberdayaan dan pengelolaan usaha kecil pertanian dan peternakan pasca panen berbasis ekonomi kreatif;
- u. pengoordinasian pemantauanserta evaluasi pertanian dan peternakan pasca panen;

- v. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(a) Seksi Pertanian

(1) Seksi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanian dan Peternakan yang berkenaan dengan Pertanian.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada seksi Pertanian;
- b. menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran pada seksi Pertanian;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan pertanian;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup seksi pertanian;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada seksi Pertanian;
- f. menyiapkan bahan dan dokumen pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian;
- g. menyiapkan bahan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kota;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumber daya pertanian;

- i. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Pertanian;
- j. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Pertanian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

(b) Seksi Peternakan

(1) Seksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanian dan Peternakan yang berkenaan dengan Peternakan.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada seksi Peternakan;
- b. menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran pada seksi Peternakan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan peternakan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup seksipeternakan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada seksi Peternakan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan;
- g. menyiapkan fasilitasi pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;

- h. menyiapkan fasilitasi pembinaan/pemantauan/pengawasan/pengendalian dan pelaporan peredaran obat hewan, praktek dokter hewan dan usaha yang bergerak dibidang produk hewan;
- i. menyiapkan fasilitasi pengadaan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- j. menyiapkan bahan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
- k. menyiapkan bahan pemberdayaan sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- l. menyiapkan bahan dan dokumen penerbitan rekomendasi Surat Izin Praktek dokter hewan;
- m. menyiapkan bahan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- n. menyusun dokumen surat keterangan kesehatan hewan hasil pengawasan terhadap pemasukan/pengeluaran hewan dan produk hewan dari/ke Daerah;
- o. menyiapkan bahan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- p. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- q. menyiapkan bahan dan dokumen penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, klinik hewan, pasar hewan, Rumah Potong Hewan, serta Produk Hewan;

- r. menyiapkan bahan dan dokumen penerbitan rekomendasi Izin Usaha Pengecer meliputi toko, retail, sub distributor obat hewan;
- s. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Peternakan;
- t. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai dilingkup seksi Peternakan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

(c) Seksi Pasca Panen Pertanian dan Peternakan

(1) Seksi Pasca Panen Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanian dan Peternakan yang berkenaan dengan Pasca Panen Pertanian dan Peternakan.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pasca Panen Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, operasional, prosedur dan kriteria pada seksi Pasca Panen Pertanian dan Peternakan;
- b. menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran pada seksi Pasca Panen Pertanian dan Peternakan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan pasca panen pertanian dan peternakan;

- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup seksi Pasca Panen Pertanian dan Peternakan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada seksi Pasca Panen Pertanian dan peternakan;
- f. menyiapkan bahan dan dokumen pemberdayaan dan pengelolaan usaha kecil pertanian dan peternakan pasca panen berbasis ekonomi kreatif;
- g. menyiapkan bahan dan dokumen promosi produk pertanian dan peternakan pasca panen;
- h. menyiapkan bahan dan dokumen penerbitan rekomendasi Izin Usaha Produk Hewan;
- i. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Pasca Panen Pertanian dan Peternakan;
- j. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai seksi Pasca Panen Pertanian dan Peternakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

#### **F. Bidang Perikanan**

1. Bidang Perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugasmembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakanPerikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup bidang perikanan;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup bidang perikanan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dilingkup perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk perikanan;
- e. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk perikanan;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup bidang Perikanan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas dilingkup perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk perikanan;
- h. pengoordinasian penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;
- i. pengoordinasian penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan di bidang pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
- j. pengoordinasian pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- k. pengoordinasian pemberdayaan usaha kecil pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan berbasis ekonomi kreatif;
- l. pengoordinasian pengelolaan pembudidayaan ikan;
- m. pengoordinasian pengelolaan kegiatan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
- n. pengoordinasian pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan serta obat ikan;



- o. pengoordinasian pengelolaan kawasan budidaya perikanan dan perairan umum berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- p. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- q. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Bidang Perikanan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(a) Seksi Perikanan Budidaya

(1) Seksi Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan yang berkenaan dengan Perikanan Budidaya.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, operasional, prosedur dan kriteria pada seksi Perikanan Budidaya;
- b. menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran pada seksi Perikanan Budidaya;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan urusan perikanan budidaya;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup seksi perikanan budidaya;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada seksi perikanan budidaya;

- f. menyiapkan bahan dan dokumen penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan;
- g. memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- h. memfasilitasi pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan serta obat ikan;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan kawasan budidaya perikanan dan perairan umum berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- j. menyiapkan bahan dan dokumen penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan;
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Perikanan Budidaya;
- l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Perikanan Budidaya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

(b) Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

(1) Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan yang berkenaan dengan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman,

- norma, standar, operasional, prosedur dan kriteria pada seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- b. menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran pada seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas urusan penguatan daya saing produk perikanan;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup seksi penguatan daya saing produk perikanan;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
  - f. menyiapkan bahan dan dokumen penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan;
  - g. menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
  - h. melaksanakan pemberdayaan usaha kecil pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan berbasis ekonomi kreatif;
  - i. menyelenggarakan dan memfasilitasi promosi produk perikanan unggulan Daerah;
  - j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
  - k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

#### **G. UPT dan Jabatan Fungsional**

1. Pada Dinas dapat dibentuk UPT.
2. UPT dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu.
3. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
5. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai dengan kebutuhan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh tenaga fungsional.
9. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.2 SUMBERDAYA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TANGERANG SELATAN**

Sumberdaya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari sumberdaya manusia dan sumberdaya aset.

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia (pegawai) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan berjumlah 93 orang. Terdiri dari 49 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 44 pegawai non PNS. Tingkat pendidikan PNS di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan terdiri dari:

- a. Strata 2 : 12 Orang
- b. Strata 1/D IV : 29 Orang
- c. Diploma III : 6 Orang
- d. SLTA : 2 Orang

Tingkat pendidikan pegawai non PNS di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan terdiri dari:

- a. Strata 2 : 0 Orang
- b. Strata 1/D IV : 23 Orang
- c. Diploma III : 0 Orang
- d. SLTA : 21 Orang

### 2.2.2 Sumberdaya Aset

Aset yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan terdiri dari:

NO 1	NAMA BIDANG BARANG 4	JUMLAH BARANG 5	JUMLAH HARGA (Rp) 6	Ket. 7
EKS. KABUPATEN TANGERANG				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.700	3.350.000.000	2010
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20.000	300.000.000	2010
3	Tanah Taman/Pertanian Terpadu	104.971	120.401.622.300	2015
4	AC Split	18	72.000.000	2010
5	Treng Air	1	1.000.000	2010
6	Lemari Besi	1		2010

			2.000.000	
7	Kursi Lipat	3	6.000.000	2010
8	AC Split	1	6.700.000	2010
9	PC Unit	1	13.000.000	2010
10	Printer	1	1.800.000	2010
11	Auto Clape	1	1.537.000	2010
12	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen		93.881.000	2010
13	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen		1.500.000.000	2010
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen		139.930.000	2010
15	Bangunan Rumah Sakit Hewan		170.205.000	2010
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen		109.375.000	2010
17	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain		109.945.000	2010
18	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain		328.427.000	2010
<b>PENGADAAN TANGERANG SELATAN</b>				
1	Mesin Tik	1	2.000.000	2009
2	Pesawat TV 21"	1	2.500.000	2009
3	Pesawat TV 32"	1	12.251.509	2009
4	Almari	4	12.000.000	2009
5	White Board	1	1.000.000	2009
6	Printer Laser Jet	3	7.500.000	2009
7	Printer Dot Matrik	1	6.000.000	2009
8	Scaner	1	2.000.000	2009
9	ASDL Modem	1	2.000.000	2009
10	Kamera Digital	1	5.000.000	2009
11	LCD & Proyektor	1	17.000.000	2009
12	Sound System	1	15.000.000	2009
13	Faximili	1	2.500.000	2009
14	Brankas	1	15.000.000	2009
15	Filling Cabinet	17	34.000.000	2009
16	Komputer PC	5	50.000.000	2009



17	AC 1 PK	2	11.250.000	2009
18	AC 1/2 PK	2	10.000.000	2009
19	Sepeda Motor	1	20.000.000	2009
20	Modem Internal External	1	1.500.000	2009
21	Komputer Note Book	2	35.200.000	2009
22	Komputer Note Book	5	99.000.000	2009
23	Komputer Note Book	3	59.550.000	2009
24	Printer	1	2.500.000	2009
25	Kamera	1	4.900.000	2009
26	Meja Kerja SKPD	1	4.000.000	2009
27	Meja Kerja Sekretaris	1	3.000.000	2009
28	Meja Kerja Kabid	4	12.000.000	2009
29	Meja Kerja Ka. Seksi	12	24.658.135	2009
30	Meja Rapat	2	8.000.000	2009
31	Kursi Kerja SKPD	1	2.500.000	2009
32	Kursi Sekretaris	1	1.600.000	2009
33	Kursi Kabid	4	4.991.956	2009
34	Sofa	2	9.123.400	2009
35	Dispenser	4	8.000.000	2009
36	Kulkas	1	2.424.000	2009
37	Penghias Ruangan	1	42.709.500	2009
38	Motor	4	59.900.000	2010
39	Motor	1	16.980.000	2010
40	Motor	1	20.995.000	2010
41	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1	4.900.000	2010
42	Sofa	1	4.000.000	2010
43	Alat-alat Laboratorium/uji mutu	2	66.835.844	2010
44	Lemari Obat	1	2.000.000	2010
45	Lemari Es	1	6.000.000	2010
46	Alat-alat Kedokteran Hewan	1		2010



			3.180.000	
47	Alat-alat Laboratorium Peternakan	1	4.850.000	2010
48	Alat Kedokteran Hewan	1	85.750.000	2010
49	Alat Laboratorium Peternakan	3	6.750.000	2010
50	Komputer PC	2	19.800.000	2010
51	Laptop	3	50.700.000	2010
52	Printer	4	7.600.000	2010
53	Kelengkapan Komputer	1	6.300.000	2010
54	Camera Digital	1	7.400.000	2010
55	Komputer PC	2	19.900.000	2010
56	Printer	2	3.900.000	2010
57	Camera Digital	1	6.000.000	2010
58	Handycam	1	10.000.000	2010
59	Software Anti virus	1	1.400.000	2010
60	Software Anti virus	2	3.000.000	2010
61	Kamera	3	20.700.000	2011
62	Handycam	2	15.800.000	2011
63	Soundsystem	1	12.900.000	2011
64	PC	4	40.421.360	2011
65	Notebook	8	121.467.200	2011
66	Printer LaserJet	6	8.835.825	2011
67	Printer 3 in 1	3	5.941.330	2011
68	Stabilizer	7	7.109.285	2011
69	Hand Tractor	1	27.039.356	2011
70	Mesin Potong Rumput	1	7.279.827	2011
71	Mesin Steam/Pompa Air	1	7.695.817	2011
72	Alat alat Kedokteran Hewan (Mikroskop Binokuloer)	1	7.200.550	2011
73	Alat alat Kedokteran Hewan (Meja Periksa Sedang)	1	2.700.000	2011
74	Vacum Clraner	1	2.000.000	2011
75	Mesin tik manual	2	4.057.813	2011

76	Mesin tik elektrik	1	2.434.687	2011
77	Mesin penghancur kertas	1	8.063.601	2011
78	AC	2	6.180.360	2011
79	Sofa	3	15.497.722	2011
80	Sepeda Motor	5	74.337.011	2011
81	Sepeda Motor	3	45.350.489	2011
82	AC Mobil Pick Up	1	7.500.000	2011
83	Lemari	1	1.955.000	2011
84	Filling Kabinet 4 laci	1	2.800.000	2011
85	Meja Kerja	1	1.800.000	2011
86	Kursi Kerja	1	1.800.000	2011
87	Tempat Tidur	1	1.900.000	2011
88	Sofa	1	3.500.000	2011
89	AC	1	3.400.000	2011
90	Kamera	1	5.200.000	2011
91	Mesin penghancur kertas	1	8.349.000	2011
92	AC	7	20.366.500	2011
93	Notebook	4	56.634.025	2011
94	Printer Fotocopy	2	2.568.375	2011
95	Kendaraan Roda 4	1	220.987.507	2011
96	Kendaraan Roda 4	1	132.970.993	2011
97	Mesin Potong Rumput	2	3.000.000	2011
98	Filling Kabinet 2 laci	15	21.590.311	2011
99	Lemari Arsip	2	5.757.416	2011
100	Filling Kabinet 4 laci	8	15.627.273	2011
101	Kendaraan Roda 2	4	56.913.000	2011
102	Kendaraan Roda 2	1	16.494.737	2011
103	Kendaraan Roda 2	1	22.680.263	2011
104	Autoclave	2	7.679.567	2011
105	Sprayer	1		2011

			3.895.433	
106	Kamera Digital	1	5.837.785	2011
107	HAndycam	2	9.318.957	2011
108	Proyektor	1	8.682.258	2011
109	PH/Temperature Portable	1	9.500.000	2011
110	Mesin Potong Rumput	2	4.680.000	2011
111	Pompa Air Tawar	1	6.433.033	2011
112	Generator Set	1	7.081.609	2011
113	Freezer	1	3.532.895	2011
114	Peralatan Produksi	1	5.062.059	2011
115	Peralatan Kerja	1	4.640.220	2011
116	Peralatan Panen	1	4.640.220	2011
117	Mikroskop	1	14.342.500	2011
118	Cool Box	1	2.003.732	2011
119	DO Meter	1	7.500.000	2011
120	Tabung Oksigen	1	1.311.000	2011
121	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung Uang	1	3.500.000	2012
122	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air/Jet Pump	1	7.000.094	2012
123	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	1	11.223.920	2012
124	Belanja Modal Pengadaan Laptop	4	38.714.391	2012
125	Belanja Modal Pengadaan Printer Foto Copy	6	17.842.373	2012
126	Belanja Modal Pengadaan Printer Dot Metrik	1	2.399.316	2012
127	Belanja Modal Pengadaan GPS	7	41.400.000	2012
128	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Uji Tanah Kering	2	2.538.000	2012
129	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian	2	2.400.000	2012
130	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian (Irigasi Mikro)	1	36.306.908	2012
131	Belanja Modal Pengadaan alat-alat Pengolahan Pertanian (Power Sprayer)	1	1.737.285	2012
132	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bajak ( Hand Traktor )	2	52.199.152	2012
133	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian ( Mesin Pemotong Rumput )	3	18.815.973	2012

134	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian ( Mesin Pompa Air )	4	24.076.353	2012
135	Belanja Modal Pengadaan Filing Cabinet, Merk VIP, Type 404, Warna Gray	1	2.200.000	2012
136	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja, Meja Kerja Kasi ( Merk City Wood Trijaya )	4	6.534.715	2012
137	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (kasubag/kasi)	4	7.700.000	2012
138	Belanja Modal Pengadaan Sofa, Sofa merk Anugrah	1	6.600.000	2012
139	Belanja Modal Pengadaan Rak arsip	2	3.080.000	2012
140	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Perikanan (Thermometer Celup Digital Waterproof merk Hanna)	1	4.700.000	2012
141	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	2	30.528.409	2012
142	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	2	14.246.591	2012
143	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	1	1.060.000	2012
144	Belanja Modal Pengadaan alat-alat Pengolahan Pertanian (Power Sprayer)	2	5.000.000	2012
145	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak (Oven)	1	1.850.000	2012
146	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Perikanan	1	100.350.000	2012
147	Belanja Modal pengadaan Air Conditioner	2	6.600.000	2012
148	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer (Tablet PC)	1	6.515.000	2012
149	Belanja Modal Pengadaan Kamera (kamera Digital SLR)	1	10.439.393	2012
150	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan (timbangan hewan digital)	1	9.700.000	2012
151	Printer	1	1.400.000	Hibah Kementan 2012
152	Kendaraan Roda 3	2	43.000.000	Hibah Kementan 2012
153	Notebook	1	9.281.545	Hibah Kementan 2012
154	Mesin Absensi	1	6.000.000	2013
155	Komputer PC	1	13.915.000	2013
156	Komputer Note Book	8	55.136.000	2013

157	Printer	2	9.300.000	2013
158	Alat-alat Kedokteran Hewan	1	79.695.000	2013
159	Freezer"Daimitsu"	1	2.600.000	2013
160	Meat Grinder "Maksindo"	1	9.000.000	2013
161	Spinner "Maksindo"	1	5.000.000	2013
162	Vacum Sealer "Powerpack"	1	1.500.000	2013
163	Mesin Penepung Tipe F37/F37 M Heavy Duty (Yanmar 11,5 HP/TF115 MR)	1	30.372.343	2013
164	Mesin Pengaduk Tipe MPK 50 (Yanmar 6,5 HP/TF65 R)	1	28.313.304	2013
165	Mesin Pencetak Pelet Tipe MPS 100/MP 100 Stainless Stell (Yanmar 8,5 HP/TF 85 MR)	1	35.350.706	2013
166	Mesin Pengering Tipe Oven BPS 2400 /BP 2400 Stainless (Yanmar 6,5 HP/TF 65 R + LPG)	1	56.563.647	2013
167	Sepeda Motor vario CW	3	41.896.500	2013
168	Mesin Bajak	1	25.800.000	2013
169	Toyota Avanza Veloz	2	359.000.000	2013
170	Mesin Pembuat Es Cream	1	12.740.000	2013
171	PH Meter Digital	1	4.800.000	2013
172	Camera	1	13.700.000	2013
173	Camera	3	19.800.000	2013
174	Camera	1	9.000.000	2013
175	Kendaraan Roda 4 / Mobil Laboratorium Kesehatan Ikan & Lingkungan	1	107.255.000	2013
176	Alat-alat Laboratorium Perikanan (Pekerjaan Modifikasi Mobil Laboratorium Kesehatan Ikan & Lingkungan	1	68.100.000	2013
177	Kendaraan Roda 2	1	16.530.000	2013
178	AC	4	15.600.000	2013
179	Tabung Pemadam Kebakaran	2	3.000.000	2013
180	Server dan Sms Gateway	1	39.596.000	2013
181	Printer Pixma MX 879 3 in 1	1	4.500.000	2013
182	HAndycam	1	4.225.000	2013
183	Pocket GPS (garmin 550)	1		2013

			5.850.000	
184	GPS survey Lapangan (garmin eTrex 30)	3	15.000.000	2013
185	Autoclave	1	2.650.000	2013
186	Rak Kultur	4	5.825.000	2013
187	Kompas Gas, Tabung & Kabel	2	3.368.000	2013
188	Laminar Flow	1	16.227.500	2013
189	Enkas (Panjang 50 cm x Lebar 45 cm & Tinggi 35cm)	1	1.165.000	2013
190	Notebook	3	28.080.000	2013
191	Mesin Potong Rumput	1	2.700.000	2013
192	PH Meter PEN Meter Luhtron	1	2.100.000	2013
193	Alat-alat Pengolahan Perikanan (Happa Kolam Induk)	4	8.000.000	2014
194	Alat-alat Pengolahan Perikanan (Blower)	2	2.200.000	2014
195	Mesin Absen Face Scan	1	7.000.000	2014
196	Mesin Absensi Finger Scan	1	4.000.000	2014
197	Kendaraan Roda 2 (B 6088 NQA, B 6089 NQA, B 6090 NQA, B 6091 NQA) Honda New Vario 110	4	57.800.800	2014
198	Mesin Perontok Serbaguna (Merk Honda Model GX 160)	1	10.120.000	2014
199	Traktor Mini (Merk Honda GXv 200 (6,5 hp))	1	17.600.000	2014
200	Kulkas (LG Tipe GN-M352RPC)	1	5.665.000	2014
201	Kitchen Set	1	18.000.000	2014
202	Laptop (Asus A55 OCC-XX470D)	2	20.429.640	2014
203	Papan Nama Dinas Ukuran Papan Informasi	1	7.450.000	2014
204	Printer (Epson L350)	2	5.030.000	2014
205	Printer (Canon MX397)	2	3.000.000	2014
206	Kotak Artificial Insemination (AI) (Alat Laboratorium)	3	10.500.000	2014
207	Perangkat Both Stand Videotron	1	35.826.450	2014
208	Filling Kabinet 2 Laci	2	3.000.000	2014
209	Alat Peternakan	2	22.600.000	2014
210	Alat Peternakan	1	21.400.000	2014
211	Alat Peternakan	1	14.000.000	2014

212	Papan Tulis Elektronik	1	2.000.000	2014
213	Motor Sprayer	1	3.200.000	2014
214	Rak Arsip 2 Pintu Kaca	1	5.435.000	2014
215	AC	4	19.996.000	2014
216	Televisi	1	6.960.000	2014
217	Laptop	1	9.885.000	2014
218	Meja Rapat Kotak	4	6.000.000	2014
219	Kursi Kerja Esselon II	1	3.455.000	2014
220	Sound System	1	9.485.000	2014
221	Microphone	1	5.000.000	2014
222	Kolam Terpal Portable	3	6.600.000	2014
223	Kolam Fiber Portable	1	6.000.000	2014
224	Timbangan	1	1.605.000	2014
225	Alat Pental Bulu Domba	1	85.900.000	2014
226	Komputer PC	1	8.500.000	2014
227	Notebook (Asus)	1	10.000.000	Hibah Kementan 2014
228	Kendaraan Roda 3 (Viar)	1	22.334.000	Hibah Kementan 2014
229	Kolam Terpal Portable Bahan Terpoulin Diameter 3 M	4	9.020.000	2015
230	Maket Peternakan Perkotaan	1	12.025.000	2015
231	Peralatan Hipofisasi dan Perikanan Hg Test Kit	1	1.250.000	2015
232	Peralatan Hipofisasi dan Perikanan NO3 Test Kit	1	1.250.000	2015
233	Peralatan Hipofisasi dan Perikanan NH3 Test Kit	1	1.250.000	2015
234	Pompa Air	3	7.500.000	2015
235	Komputer PC	1	6.360.000	2015
236	Laptop	5	57.375.000	2015
237	Infokus	2	27.900.000	2015
238	Printer All in One	2	12.941.200	2015
239	Scanner	1	10.630.000	2015
240	Printer Multi Fungsi	1		2015





			7.645.600	
241	Printer	2	6.716.000	2015
242	Lemari Sliding Kaca	3	15.000.000	2015
243	Lemari Filing Cabinet	4	8.000.000	2015
244	TV LED	1	4.000.000	2015
245	AC Split	1	4.000.000	2015
246	Mesin Finger	2	6.000.000	2015
247	Dispenser	1	2.100.000	2015
248	Vacum Cleaner	1	2.000.000	2015
249	Meja Kerja	6	10.200.000	2015
250	Meja Tamu	1	2.000.000	2015
251	Sofa Tamu	1	5.000.000	2015
252	Kitchen Set	1	5.000.000	2015
253	Mesin Potong Rumput	3	7.650.000	2015
254	Tabung Oksigen	1	2.500.000	2015
255	DO Meter	1	4.994.000	2015
256	Global Positioning System	1	7.000.000	2015
257	Freezer	1	3.380.000	2015
258	Alat-Alat Pengolahan Pupuk Organik	1	44.984.000	2015
259	Tempat Penyimpanan Vaksin	1	2.900.000	2016
260	Tempat Penyimpanan Alat-alat/Obat-obatan Perikanan	1	4.900.000	2016
261	Mobil	2	370.360.000	2016
262	Air Conditioner	3	11.175.000	2016
263	Alat pencacah/Perajang Rumput	1	20.800.000	2016
264	Laptop	5	64.710.000	2016
265	PC	5	46.400.000	2016
266	Sepeda Motor	2	35.960.000	2016
267	Sepeda Motor	2	34.524.000	2016
268	Printer	5	26.000.000	2016
269	Harddisk Eksternal	2	4.071.000	2016
270	Projektor	1		2016

			5.000.000	
271	Scanner	1	1.950.000	2016
272	Mesin Absen	1	4.460.000	2016
273	Rehab Gedung Kantor	1	33.013.000	2010
274	Konstruksi Gedung Kantor	1	64.375.000	2011
275	Konstruksi Gedung Utama Hatchery dan Mess Karyawan	1	697.075.000	2011
276	Konstruksi Gedung Laboratorium, Kantor, Gudang dan Kolam Outdoor	1	217.454.000	2011
277	Konstruksi Gedung Kantor	1	144.136.000	2011
278	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (perbaikan green house)	1	90.646.473	2012
279	Pengadaan kontruksi/Pembelian gedung kantor (pagar kantor)	1	50.409.000	2012
280	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kolam (Paving Block)	1	59.307.000	2012
281	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kolam (pemagaran)	1	100.066.000	2012
282	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kolam (Mes Karyawan)	1	75.082.000	2012
283	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kolam (Gedung Utama HSRT)	1	101.087.000	2012
284	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kolam (Kolam Outdoor)	1	99.770.000	2012
285	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (Renovasi Kantor dan Ruang Rapat Teknis)	1	241.285.000	2012
286	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (Renovasi Bangunan Laboratorium)	1	364.525.000	2012
287	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung kantor (Renovasi Ruang Rapat Umum)	1	350.015.000	2012
288	Konstruksi Bangunan Kolam	1	110.066.154	2013
289	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kolam	1	98.770.219	2013
290	Pembangunan Rumah Mesin Pelet	1	86.610.000	2013
291	Pembangunan Garasi Mobil Laboratorium BPP Jombang	1	51.453.000	2013
292	Penataan Halaman	1	49.940.000	2013
293	Rehabilitasi Gedung	1	99.598.000	2013
294	Pembangunan Pagar dan Gapura	1	196.934.000	2013
295	Penataan Halaman Kantor	1		2013



			100.678.000	
296	Pembangunan Kolam Tadah Hujan	1	121.748.000	2014
297	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Renovasi /Rehab Gedung Kantor (Renovasi Gudang)	1	81.118.500	2014
298	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Perbaikan/Rehabilitasi Green House	1	182.150.000	2014
299	Pembuatan auning Kolam Percontohan	1	54.950.000	2014
300	Pembuatan Pos Satpam	1	45.700.000	2014
301	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kolam/Taman (Pembuatan Green House Dinas)	1	184.508.400	2014
302	Penataan Halaman Kantor Dinas Pertanian	1	105.864.000	2014
303	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (Screen House)	1	49.000.000	2014
304	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (sub. kegiatan Hardscape/Perbaikan Taman)	1	44.500.000	2014
305	Bangunan MCK/Fasilitas Umum Kantor Dinas Pertanian	1	43.742.600	2014
306	Kolam Ikan	20 Meter	39.039.388	2015
307	Bangunan Pengelolaan Pupuk Organik (BPP Jombang)	1	180.196.000	2015
308	Pembangunan Saung Pintal Bulu Domba	1	115.008.200	2015
309	Pembangunan kolam karantina induk ikan	1	75.510.000	2016
310	Instalansi Listrik		4.000.000	2010
311	Lampu Taman		1.750.000	2010
312	Instalasi Listrik		9.750.000	2011
313	Instalasi Listrik		9.300.000	2012
314	Instalasi Listrik		5.000.000	2013
315	Buku Peraturan Per-undang-undangan		750.000	2010
316	Buku Peraturan Per-undang-undangan		750.000	2010
317	Buku peraturan perundang undangan		735.000	2011
318	Tanaman Bibit Anggrek Dendrobium		102.926.000	2012
319	Tanaman Bibit Anggrek Bulan		44.850.000	2012
320	Buku Ensiklopedia	1	2.100.000	2014

321	Maket Pengolahan Limbah Biogas	1	12.025.000	
322	Software Aplikasi		29.645.000	2011
323	Software Aplikasi		47.500.000	2011
324	LED Running Text	1	8.000.000	2015
325	Pemeliharaan/Perawatan Gedung/Taman		99.950.000	2011
326	Pemeliharaan/Perawatan Gedung/Taman		31.300.000	2011
327	Pemeliharaan/Perawatan Gedung/Taman		40.800.000	2011
<b>TOTAL</b>			<b>137.104.681.587</b>	

Tabel 2.1

Rekap Aset Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kota Tangerang Selatan

NO	KIB	AWAL  2015	MUTASI 2016							AWAL  2017
			MASUK				KELUAR			
			PENGADAAN	HIBAH	EKS KAB.	TOTAL	HIBAH	LAIN-LAIN	TOTAL	
1	KIB A (TANAH)	124.051.622.300	-	-	-	-	-	-	-	124.051.622.300
2	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)	4.711.625.353	633.210.000	-	-	633.210.000	-	-	-	5.344.835.353
3	KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)	7.181.582.934	75.510.000	-	-	75.510.000	-	-	-	7.257.092.934
4	KIB D (JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI)	29.800.000	-	-	-	-	-	-	-	29.800.000
5	KIB E (ASET TETAP LAINNYA)	164.136.000	-	-	-	-	-	-	-	164.136.000
6	KIB F (KONTRUKSI DALAM Pengerjaan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	85.145.000	-	-	-	-	-	-	-	85.145.000
8	ASET RENOVASI	172.050.000	-	-	-	-	-	-	-	172.050.000
9	ASET LAIN-LAIN (ASET BERMASALAH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	136.395.961.587	708.720.000	-	-	708.720.000	-	-	-	137.104.681.587

**2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TANGERANG  
SELATAN**

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan) pada periode Renstra sebelumnya yaitu tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kota Tangerang Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatan produksi hasil pertanian		40%		0%	10%	20%	30%	40%	0%	14,23%	16,02%	-13,21%	1,09%	-	142,30%	80,10%	-44,03%	2,73%
2	Cakupan bina kelompok tani		43%		6%	16%	26%	36%	43%	6%	15%	79%	80%	90%	100,00%	93,75%	303,85%	222,22%	209,30%
3	Cakupan bina kelompok peternak 75%		60%		-	15%	30%	45%	60%	20,51%	30,77%	41,03%	56,41%	69,23%	-	205,13%	136,77%	125,36%	115,38%
4	Produksi hasil peternakan		40%		25%	10%	20%	30%	40%	80,41%	75,96%	90,73%	108,18%	145,68%	321,64%	759,60%	453,65%	360,60%	364,20%
5	Prosentase produksi perikanan		50%		10%	20%	30%	40%	50%	62,15%	286,53%	146,28%	57,25%	83,34%	621,50%	1432,65%	487,60%	143,13%	166,68%
6	Cakupan bina POKDAKAN,UPR dan Kelompok Pengolah		80%		0%	20%	40%	60%	80%	10,71%	22,14%	63,96%	65%	97,14%	-	110,70%	159,90%	108,33%	121,43%
7	Penguatan cadangan pangan	60%			-	40%	45%	50%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%			-	50%	60%	70%	80%	-	75%	62%	77,59%	79,17 %	-	150,00%	103,33%	110,84%	98,96%

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan, 2016

Tabel 2.3  
Anggaran dan Realisasi Program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kota Tangerang Selatan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Non Urusan Setiap SKPD	2.970.057.188	2.473.467.000	3.592.115.000	3.251.057.150	3.245.997.760	2.758.593.276	2.131.596.091	3.093.887.115	3.046.952.336	2.999.100.071	92,88%	86,18%	86,13%	93,72%	92,39%	55.188.114	48.101.359
Peningkatan Produksi Hasil Pertanian / Perkebunan	2.951.641.040	3.444.229.000	1.927.709.550	3.136.111.900	3.241.230.000	2.874.369.605	3.104.046.633	1.822.692.160	3.032.400.736	2.985.389.928	97,38%	90,12%	94,55%	96,69%	92,11%	57.917.792	22.204.065
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	928.047.660	1.538.765.000	1.197.320.825	1.435.042.000	2.813.016.200	896.834.435	1.443.591.000	1.150.646.325	1.352.390.500	2.008.073.850	96,64%	93,81%	96,10%	94,24%	71,39%	376.993.708	222.247.883
Pengembangan Budidaya Perikanan	1.990.497.000	1.798.869.000	1.063.784.819	2.575.760.950	2.489.625.310	1.607.024.700	1.445.594.654	1.063.784.819	2.374.683.050	3.320.184.738	80,73%	80,36%	100,00%	92,19%	133,36%	99.825.662	342.632.008
Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengelolaan Hasil Perikanan	376.275.000	499.505.000	508.004.500	334.460.000	565.000.000	305.924.000	432.536.700	508.004.500	302.387.450	514.194.900	81,30%	86,59%	100,00%	90,41%	91,01%	37.745.000	41.654.180
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	-	1.065.000.000	1.262.303.125	717.568.000	1.826.330.730	-	920.410.000	1.184.026.199	692.586.825	1.182.238.000	-	86,42%	93,80%	96,52%	64,73%	365.266.146	236.447.600

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan, 2016

Penjelasan pencapaian target kinerja tahun 2011-2015 sebagaimana tersebut di atas adalah berikut :

1. Program Non Urusan Setiap SKPD

- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan, dan penyusunan dokumen perencanaan.
- c. Sasaran prioritas yang akan dicapai yaitu lancarnya sarana komunikasi dan listrik dinas, tersedianya jasa kebersihan dan pengamanan kantor, tersedianya alat tulis kantor, tersedianya barang cetakan dan penggandaan, tersedianya peralatan listrik dinas, tersedianya peralatan rumah tangga dinas, tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan, tersedianya makanan dan minuman dinas, lancarnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah, tersedianya jasa sewa kendaraan roda empat, tersedianya kendaraan dinas/operasional, tersedianya perlengkapan gedung kantor, tersedianya mebeleur dinas, terpeliharanya gedung kantor, tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional, terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, tersedianya asuransi kendaraan bermotor, tersedianya peralatan pengolahan pertanian, tersedianya peralatan kantor, tersedianya pakaian dinas harian, tersedianya pakaian olah raga, tersedianya pakaian batik, tersedianya dokumen laporan semesteran, tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran, tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun, tersedianya



dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, tersusunnya dokumen rencana strategis dinas, tersusunnya dokumen hasil forum dinas, tersusunnya dokumen RKA dinas, tersusunnya dokumen DPA dinas.

## 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

- a. Sebagai indikator Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan adalah indikator peningkatan produksi hasil pertanian dengan rumusan indikatornya persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian dan indikator cakupan bina kelompok tani dengan rumusan indikator persentase jumlah kelompok tani yang telah dibina/mendapat bantuan dibagi jumlah kelompok tani yang ada di Kota Tangerang Selatan.
- b. Pada tahun 2015, capaian terhadap indikator peningkatan produksi hasil pertanian hanya sebesar 1,09% dari target 40% (tingkat capaian 2,72%). Tingkat capaian yang sangat rendah diantaranya disebabkan oleh hasil produksi pertanian yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam/cuaca. Selain itu terjadi *over estimate* dalam penetapan target peningkatan produksi 40% pada masa akhir RPJMD Kota Tangerang Selatan, mengingat produktivitas pertanian di Kota Tangerang Selatan sudah relatif tinggi sehingga agak sulit untuk ditingkatkan secara signifikan, sebagai contoh produktivitas padi secara nasional berada pada angka di bawah 6 ton/ha, sedangkan produktivitas padi Kota Tangerang Selatan sebesar 6,99 ton/ha.
- c. Target capaian indikator cakupan bina kelompok tani sebesar 43% dapat dicapai dengan sangat baik dengan capaian indikator 90% (tingkat capaian 209,30%).

d. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan didukung oleh kegiatan-kegiatan diantaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (pengadaan sarana dan prasarana teknis BPP Jombang), Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan (pengembangan Kampung Anggrek, revitalisasi kelompok hortikultura, sosialisasi perundang-undangan hortikultura, pengadaan distribusi tanaman buah-buahan, pupuk dan obat-obatan serta bantuan bibit unggul anggrek kepada masyarakat), Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok, pengadaan sarana dan prasarana pertanian, distribusi bantuan tanaman pangan alternatif, pelatihan teknologi pupuk organik kompos, validasi data statistik pertanian, penyusunan keputusan walikota tentang alokasi pupuk bersubsidi dan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dan peningkatan SDM petani), Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (pelatihan dan distribusi bantuan tanaman obat keluarga, pelatihan budidaya jamur dan workshop anggrek Kota Tangerang Selatan), Kegiatan Pameran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan (promosi produk hortikultura pada Pameran PF2N, promosi produk tanaman hias pada pameran flora dan fauna, Pekan Anggrek Kota Tangerang Selatan, fasilitasi sarana pemasaran dan penyediaan hasil produksi pertanian pada Bazar Ramadhan, focus group discussion (FGD) dalam rangka perjanjian kerjasama (PKS) menuju revitalisasi usaha kelompok tani anggrek dan revitalisasi pengembangan usaha kelompok tani anggrek. Dengan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pameran

diharapkan para petani/pelaku usaha pertanian dapat terus meningkatkan produksinya dari sisi kualitas dan kuantitasnya) serta Kegiatan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pelaku Usaha Pertanian.

### 3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- a. Sebagai indikator Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan adalah indikator cakupan bina kelompok peternak dengan rumusan indikator persentase jumlah kelompok peternak yang telah dibina/mendapat bantuan dibagi jumlah kelompok peternak yang ada di Kota Tangerang Selatan serta indikator peningkatan produksi hasil peternakan dengan rumusan indikatornya persentase peningkatan produksi hasil peternakan terhadap produksi tahun 2010.
- b. Capaian indikator cakupan bina kelompok peternak sampai dengan tahun 2015 sebesar 69,23% dari target 60% (tingkat capaian 115,38%). Dari jumlah kelompok peternak 39 kelompok, ada 27 kelompok yang telah dibina/mendapat bantuan.
- c. Capaian terhadap indikator peningkatan produksi hasil peternakan sebesar 145,68% dari target 40% (tingkat capaian 364,20%).
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan didukung oleh kegiatan-kegiatan diantaranya Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat (pengembangan ternak ruminansia besar, pelatihan pengembangan ternak kuminansia kecil, penguatan kapasitas produksi kebun rumput kelompok dan pengawasan mutu pakan serta pelatihan budidaya domba bagi Kelompok Wanita Tani), Kegiatan Pelatihan Pengembangan Peternakan (pelatihan

budidaya aneka ternak, gemar berternak hewan kesayangan di usia muda dan pembangunan saung pintal bulu domba), Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Qurban, Kegiatan Pengembangan Penanganan Pasca Panen Bidang Peternakan (pengembangan higienis dan sanitasi RPH serta pelatihan pengolahan bahan asal hewan untuk kelompok wanita tani, PKK dan P2WKSS), Kegiatan Pengadaan Fasilitas Kesehatan Hewan dan Ternak (pengadaan fasilitas kesehatan dan pengawasan hewan dan ternak serta penyusunan naskah akademik raperda peternakan), Kegiatan Sosialisasi Hasil Produksi dan Teknologi Peternakan (fasilitasi promosi produk peternakan bahan asal hewan pada Bazar Ramadhan, fasilitas promosi produk peternakan bahan asal hewan pada HUT Tangsel, penyelenggaraan lomba burung berkicau, bimbingan teknis pengemasan produk olahan dan fasilitas promosi produk peternakan bahan asal hewan pada Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2015), Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak, berupa pelaksanaan inseminasi buatan, identifikasi kesehatan, reproduksi, kebuntingan, dan recording ternak sapi dan kambing/domba.

#### 4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- a. Sebagai indikator Program Pengembangan Budidaya Perikanan adalah indikator persentase peningkatan produksi perikanan dengan rumusan persentase peningkatan hasil produksi perikanan terhadap produksi tahun 2010.
- b. Capaian terhadap indikator peningkatan produksi hasil perikanan sebesar 83,34% dari target 50% (tingkat capaian 166,68%). Pada tahun 2012 peningkatan produksi perikanan meningkat jauh namun turun kembali pada tahun 2013 dan

tahun 2014, walaupun masih di atas target yang ditentukan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan. Penurunan produksi diantaranya disebabkan adanya pemanfaatan ruang yang tidak berfihak kepada pengembangan sektor pertanian termasuk sub sektor perikanan. Banyak lahan budidaya perikanan yang berubah menjadi lahan pemukiman atau bangunan lainnya. Pada tahun 2015 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyiasati kekurangan lahan budidaya perikanan melalui pengembangan kolam terpal serta memasukkan unsur teknologi (system booster) sehingga mulai terlihat adanya peningkatan produksi perikanan.

- c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan diantaranya didukung oleh Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (pengembangan budidaya ikan lele, patin, ikan mas, nila, gurame, bawal air tawar, ikan hias, sosialisasi sertifikasi cara budidaya ikan yang baik, sosialisasi sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik, pengembangan pakan ikan air tawar, alternatif, pengembangan kolam percontohan dan aplikasi teknologi budidaya perikanan darat), Kegiatan Pendistribusian Bibit Ikan Unggul, Kegiatan Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan (sosialisasi kesehatan ikan dan lingkungan di perairan umum, kunjungan lapang dan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan dan pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan di tingkat praktisi usaha perikanan, pelatihan dan aplikasi vaksinasi ikan, restocking ikan di perairan umum, pelatihan hama dan penyakit ikan serta sosialisasi undang-undang tentang obat ikan) dan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Ikan dan

Lingkungan Pembudidaya Ikan (pengadaan sarana dan prasarana kesehatan ikan dan lingkungan, penyusunan perda usaha perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan ikan dan lingkungan).

5. Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

a. Sebagai indikator Program Pengembangan Budidaya Perikanan adalah indikator cakupan bina kelompok pembudidaya ikan, unit perbenihan rakyat dan kelompok pengolah hasil perikanan.

b. Capaian terhadap indikator cakupan bina kelompok pembudidaya ikan, unit perbenihan rakyat dan kelompok pengolah hasil perikanan sebesar 97,14% dari target 80% (tingkat capaian 121,42%). Dari total jumlah kelompok pembudidaya ikan, unit perbenihan rakyat dan kelompok pengolah hasil perikanan sebanyak 140 pada akhir tahun 2015 hanya tersisa 4 kelompok yang belum mendapat bimbingan secara intensif/bantuan.

c. Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan diantaranya didukung oleh Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Ikan (pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan dan pengawasan mutu hasil perikanan) dan Kegiatan Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah (partisipasi pameran perikanan nasional, partisipasi pameran pembangunan Kota Tangerang Selatan, partisipasi pameran produk perikanan konsumsi/non konsumsi).

6. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

a. Sebagai indikator Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan adalah indikator penguatan cadangan

pangan daerah dengan rumusan indikatornya persentase cadangan pangan daerah dalam bentuk beras atau bahan makanan pokok lainnya dibagi 100 ton dan indikator pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dengan rumusan indikator persentase jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dibagi jumlah sampel.

- b. Pada tahun 2015, capaian terhadap indikator penguatan cadangan pangan masih belum terealisasi walaupun pada tahun 2015 telah dianggarkan dalam APBD Kota Tangerang Selatan. Hal ini karena masih adanya ganjalan dalam peraturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menyebutkan bahwa pengelolaan cadangan pangan daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- c. Target capaian indikator pembinaan dan pengawasan keamanan pangan mencapai angka 79,17% dari target 80% (tingkat capaian 98,96%). Artinya dari total sampel pangan yang diambil 79,17% aman dikonsumsi dan sisanya 20,83% tidak aman (mengandung residu pestisida maupun formalin). Pengujian dilaksanakan di pasar tradisional, modern maupun supermarket/hypermarket.
- d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan didukung oleh kegiatan-kegiatan diantaranya Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Kota Tangerang Selatan (revitalisasi kelompok tani, Gapoktan dan KWT, fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan persiapan Pekan Daerah 2016), Kegiatan Analisis dan

Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (pelatihan, pengumpulan data dan analisis data analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan), Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan, Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan, Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan, Kegiatan Penangan Daerah Rawan Pangan (pemetaan rawan pangan), Kegiatan Promosi Ketahanan Pangan, Kegiatan Penyusunan Database Potensi Produk Pangan (penyusunan neraca bahan makanan dan sistem kewaspadaan pangan daerah).



## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TANGERANG SELATAN

### 2.4.1. Tantangan

Seperti halnya dengan wilayah perkotaan lainnya, Kota Tangerang Selatan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan pemanfaatan lahan didominasi oleh sektor perumahan dan pemukiman. Tabel berikut menggambarkan jenis penggunaan lahan di Wilayah Kota Tangerang Selatan:

Tabel 2.4  
Jenis Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Persentase
1	Permukiman Kepadatan Sedang	38,17%
2	Permukiman Kepadatan Rendah	23,62%
3	Industri	2,01%
4	Kawasan Bandar Udara	0,70%
5	Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara	0,42%
6	Kawasan PUSPI TEK	1,78%
7	Perdagangan dan Jasa	3,65%
8	Pariwisata	1,64%
9	Pendidikan	0,47%
10	Sawah	2,71%
11	Semak, Belukar	2,84%
12	Kebun/Ladang	15,04%
13	Danau/ Situ/ Tambak/ Kolam/ Empang	1,18%
14	Tanah Kosong	5,79%
Jumlah		100,00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

Sempitnya lahan pertanian di Wilayah Kota Tangerang Selatan berdampak terhadap struktur pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Tabel berikut menggambarkan perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan:

Tabel 2.5  
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan (Miliar  
Rupiah)

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	104,10	114,94	118,22	129,90	162,15
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	3.980,25	4.401,67	4.627,85	5.184,03	5.864,40
4	Pengadaan Listrik, Gas	30,82	36,43	43,95	52,58	59,24
5	Pengadaan Air	17,56	18,16	18,88	20,08	21,50
6	Konstruksi	3.747,19	4.376,65	5.295,44	6.418,18	7.690,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.385,76	6.421,31	7.278,21	8.006,80	8.996,52
8	Transportasi dan Pergudangan	769,34	913,66	1.055,13	1.298,84	1.571,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	942,64	1.076,15	1.225,85	1.438,71	1.720,94
10	Informasi dan Komunikasi	3.765,00	4.379,96	4.663,23	4.865,20	5.561,56
11	Jasa Keuangan	369,97	417,11	478,48	543,60	619,85
12	Real Estate	5.200,65	5.764,46	6.431,70	7.427,46	8.302,41
13	Jasa Perusahaan	919,75	1.055,68	1.220,86	1.463,38	1.752,43
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	342,90	417,98	472,34	536,04	638,73
15	Jasa Pendidikan	2.474,60	2.757,73	3.200,35	3.894,38	4.490,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.515,34	1.650,37	1.788,42	1.939,74	2.072,64
17	Jasa Lainnya	959,43	1.089,57	1.152,55	1.392,19	1.606,13
<b>Jumlah</b>		<b>30.525,31</b>	<b>34.891,85</b>	<b>39.071,49</b>	<b>44.611,13</b>	<b>51.230,27</b>

Sumber: Kota Tangerang Selatan Dalam Angka Tahun 2016, BPS

Tabel 2.6  
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan (Miliar  
Rupiah)

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	104,10	110,30	107,44	105,67	108,91
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	3.980,25	4.132,06	4.161,97	4.510,81	4.856,30
4	Pengadaan Listrik, Gas	30,82	33,83	37,89	41,81	42,58
5	Pengadaan Air	17,56	18,60	18,76	19,81	20,99
6	Konstruksi	3.747,19	4.094,10	4.612,44	5.190,08	5.664,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.385,76	6.106,60	6.686,87	7.111,78	7.504,10
8	Transportasi dan Pergudangan	769,34	890,45	974,31	1.084,61	1.210,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	942,64	1.045,15	1.098,49	1.165,87	1.268,51
10	Informasi dan Komunikasi	3.765,00	4.218,41	4.988,78	5.536,77	6.441,22
11	Jasa Keuangan	369,97	395,50	422,15	455,11	494,02
12	Real Estate	5.200,65	5.647,84	6.179,45	6.920,91	7.596,19
13	Jasa Perusahaan	919,75	1.002,60	1.093,10	1.200,50	1.352,00
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	342,90	353,71	369,87	379,37	424,35
15	Jasa Pendidikan	2.474,60	2.578,31	2.669,50	2.797,37	2.971,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.515,34	1.572,98	1.638,70	1.668,28	1.699,80
17	Jasa Lainnya	959,43	1.014,36	1.032,09	1.101,95	1.168,95
<b>Jumlah</b>		<b>30.525,31</b>	<b>33.214,82</b>	<b>36.091,80</b>	<b>39.290,71</b>	<b>42.823,77</b>

Sumber: Kota Tangerang Selatan Dalam Angka Tahun 2016, BPS

Seperti halnya distribusi pembentuk PDRB, Sempitnya lahan pertanian juga berdampak terhadap lapangan pekerjaan utama masyarakat Kota Tangerang Selatan yang didominasi oleh

lapangan pekerjaan di sektor perdagangan dan jasa. Tabel di bawah menunjukkan persentase pekerjaan utama masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.7

Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin  
di Kota Tangerang Selatan Tahun 2015

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Pertanian	2.205	1.471	3.676
2 Industri	81.505	23.663	105.168
3 Jasa-jasa	342.235	192.615	534.850
<b>Jumlah</b>	<b>425.945</b>	<b>217.749</b>	<b>643.694</b>

Sumber: Kota Tangerang Selatan Dalam Angka Tahun 2016, BPS

Produksi sektor pertanian yang sangat rendah terutama produk pangan, sangat jauh untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Ketergantungan pangan dari wilayah di luar Kota Tangerang Selatan maupun impor sangat tinggi. Pengendalian dan pengawasan pangan sangat penting untuk menjamin pangan yang dikonsumsi masyarakat Kota Tangerang Selatan memenuhi kriteria beragam, bergizi seimbang dan (B2SA). Produk pangan umumnya memiliki karakteristik *perishable* (mudah rusak), sehingga sangat rentan terkontaminasi zat pengawet, selain kontaminasi pestisida pada proses budidaya. Tabel-tabel berikut memberikan gambaran produksi beberapa komoditas pertanian di Wilayah Kota Tangerang Selatan.

#### 2.4.2. Peluang

Selain besarnya tantangan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pembangunan sektor pertanian di Kota Tangerang Selatan, terdapat beberapa peluang

yang dapat mendorong eksistensi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pembangunan Kota Tangerang Selatan secara umum dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat diantaranya:

1. Berkembangnya konsep pertanian perkotaan (*urban agriculture/urban farming*) yang telah dipraktekkan di beberapa kota besar dunia dan menjadi *bench mark* (patok duga) bagi kota lainnya dengan segala manfaat yang dapat dihasilkan.
2. Munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan pangan yang memenuhi standard B2SA (beragam, berimbang, sehat dan aman), yang diantaranya dapat dipenuhi sebagian melalui pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
3. Sektor pertanian selain berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan manfaat sosial lainnya juga berperan dalam menjaga lingkungan sehat dan asri.
4. Sektor pertanian dapat menjadi salah satu cara dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, pada tahun 2015 tingkat kemiskinan Kota Tangerang Selatan sebesar 1,69% dan tingkat pengangguran sebesar 6,23%.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya:

1. Memberikan bantuan teknis dan manajerial berupa pelatihan, penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani,

kelompok ternak dan kelompok perikanan serta pelaku usaha disektor pertanian dalam menjalankan kegiatannya dan usahanya.

2. Memberikan bantuan sebagai stimulant agar kegiatan dan usaha yang dilaksanakan kelompok dan pelaku usaha di sektor pertanian dapat berjalan dengan baik.
3. Melakukan pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
4. Melakukan pengawasan produk pangan.
5. Fasilitasi pemasaran produk sektor pertanian.

Selain bentuk pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan selama ini, diharapkan ke depan akan ada fasilitas-fasilitas teknis yang mampu mendukung kualitas pelayanan kepada, seperti :

1. Kawasan pertanian terpadu sebagai kawasan edukasi dan ecotourism pengembangan pertanian perkotaan.
2. Adanya bangunan-bangunan etalase guna promosi produk-produk unggulan.
3. Pasar bunga untuk membantu pemasaran produk unggulan hasil pertanian.
4. Klinik Hewan sebagai fasilitas kesehatan hewan dan fasilitas dalam rangka menunjang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Pasar Ikan Higienis dalam rangka membantu pemasaran produk perikanan budidaya di wilayah Kota Tangerang Selatan.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi organisasi di masa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Analisis isu-isu strategis menjadi bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan sektor pertanian di Kota Tangerang Selatan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis isu strategis sangat erat kaitannya dengan *environment scanning* atau identifikasi faktor-faktor eksternal dan internal organisasi, yang menghasilkan suatu rumusan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan organisasi itu sendiri. Strategi disusun berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi faktor-faktor eksternal dan internal organisasi.

Lingkungan organisasi terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu lingkungan umum, lingkungan operasional dan lingkungan internal. Lingkungan umum merupakan lingkungan eksternal yang terdiri dari komponen-komponen yang cakupannya luas dan mempunyai pengaruh langsung yang kecil terhadap

pengembangan sebuah organisasi. Lingkungan umum terdiri dari faktor-faktor di luar batas perusahaan, akan tetapi perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi secara resiprokal terhadap faktor luar tersebut. Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor lingkungan sekitar di luar kontrol Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan dan memiliki cakupan yang lebih sempit namun memiliki pengaruh secara langsung bagi organisasi. Sedangkan lingkungan internal yaitu faktor-faktor yang sepenuhnya berada dalam kendali Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, meliputi semua macam aspek manajemen fungsional (keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya organisasi).

Tujuan utama dari analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal adalah untuk mengidentifikasi dan memformulasikan strategi dalam menghadapi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan yang akan mempengaruhi cara-cara organisasi dalam mengejar tujuan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal penting dan berpengaruh menjadi isu-isu strategis.

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Kota Tangerang Selatan tidak bisa terlepas dari isu-isu global yang berkembang saat ini. Isu-isu strategis global yang terkait langsung dengan Tupoksi serta dapat mempengaruhi kebijakan dan program-



program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diantaranya sebagai berikut:

### 3.1.1 Dinamika Internasional

#### 3.1.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi salah satu isu yang dibahas di KTT Rio. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (***Human Development***), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (***Sosial Economic Development***), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (***Environmental Development***), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs pasca MDGs 2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*.

Ada 5 pondasi dari **SDGs** yaitu (manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan).

1. Tujuan pertama yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Tujuan kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.

3. Tujuan ketiga yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Tujuan keempat yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Tujuan kelima yakni menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6. Tujuan keenam yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Tujuan ketujuh yakni menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
8. Tujuan kedelapan yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Tujuan kesembilan yakni membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Tujuan kesepuluh yakni mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
11. Tujuan kesebelas yakni menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Tujuan keduabelas yakni menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Tujuan ketigabelas yakni mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Tujuan keempatbelas yaitu melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Tujuan kelimabelas yaitu melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Tujuan keenambelas yaitu mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Tujuan ketujuhbelas yaitu memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Gambar 3.1

#### Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Beberapa tujuan yang tercantum dalam SDGs, sangat relevan dengan sektor pertanian mengingat pertanian di wilayah perkotaan memiliki manfaat dari aspek ekonomis, sosial dan lingkungan hidup.

##### 3.1.1.2 Perkembangan Konsep Pertanian Perkotaan (Urban Agriculture/Urban Farming)



Pertanian perkotaan mulai berkembang sejak tahun 1980-an, di dasari kesadaran masyarakat dunia bahwa pada tahun 2030 di prediksi lebih dari 50% penduduk dunia tinggal di kota. Angka ini akan semakin besar pada tahun-tahun setelahnya. Semakin banyak permasalahan yang akan dihadapi kota seperti masalah pangan, kesehatan, lingkungan, pengangguran dan lain sebagainya.

Pertanian perkotaan bukanlah satu-satunya solusi dalam menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut, namun manfaat yang didapat dari pengembangan pertanian perkotaan dapat membantu berbagai permasalahan yang dihadapi kota. Berdasarkan perspektif kebijakan, fungsi pertanian perkotaan dapat terbagi ke dalam tiga perspektif utama yaitu perspektif sosial, perspektif ekonomi dan perspektif lingkungan. Berdasarkan perspektif sosial pertanian perkotaan dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menjamin ketahanan pangan kota, mengentaskan kemiskinan, menangani permasalahan sosial, membangun komunitas, sebagai jaring sosial dan lain sebagainya. Berdasarkan perspektif ekonomi, peran pertanian perkotaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha, mengembangkan rantai pasar dan lain sebagainya. Sedangkan peran pertanian perkotaan berdasarkan perspektif lingkungan yaitu sebagai manajemen tata ruang dan keanekaragaman hayati, memperbaiki iklim mikro kota, memanfaatkan sampah kota, rekreasi, penghijauan kota dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bersama bahwa emisi karbon terbesar saat ini berasal dari wilayah perkotaan (sekitar 70%) yang saat ini dampaknya dapat terasa berupa terjadinya fenomena perubahan iklim (climate change). Fokus terhadap salah satu perspektif kebijakan pertanian perkotaan akan mempengaruhi

strategi apa yang akan ditempuh oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di masa mendatang yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan mulai di susun hari ini.

#### 3.1.1.3 Perubahan Iklim (*Climate Changes*)

Perubahan iklim berdampak terhadap pemanasan global dan pergeseran musim yang tidak menentu. Perubahan pola musim basah dan kering mempengaruhi waktu tanam dan panen. Selain itu terjadi pula perubahan suhu bumi yang cenderung meningkat. Perubahan iklim juga sangat berpengaruh terhadap adaptasi makhluk hidup termasuk tanaman, hewan dan ikan yang merupakan objek dari Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Kemampuan adaptasi akan berpengaruh kepada tingkat produksi.

Beberapa sumber menunjukkan lebih dari 70% emisi karbon di dunia dihasilkan dari wilayah perkotaan sebagai faktor utama terjadinya perubahan iklim. Emisi karbon sebagian besar dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil untuk transportasi dan industri. Sektor pertanian memegang peranan penting bagi perubahan iklim baik dalam aksi mitigasi maupun adaptasi.

#### 3.1.1.4 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Dampak dari konsekuensi MEA, yaitu adanya aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.

### 3.1.2 Dinamika Nasional

Sedangkan Isu-isu Strategis Nasional yang dihadapi saat ini yang terkait langsung dengan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan diantaranya sebagai berikut :

#### 3.1.2.1 Nawacita

Nawacita adalah Sembilan program yang digagas Pemerintah untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut inti dari sembilan program tersebut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

#### 3.1.2.2 Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,



keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berbeda dengan Undang-undang tentang pangan sebelumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 selain menitikberatkan kepada ketahanan pangan juga menitikberatkan kepada prinsip kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

### 3.1.2.3 *Good Governance dan Clean Government*

*Good governance* adalah sebuah bentuk ideal mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dalam mengatur dan memecahkan masalah-masalah publik. *Good governance* hanya bisa tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung, yakni warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, dan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan diri dalam segala persoalan. Sedangkan menurut Bank Dunia (World Bank) *Good governance* adalah cara kekuasaan di gunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (the way state power is used in managing economic and social resources for development of society).



Sedangkan *Clean Government* adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good Governance* dan *Clean Government* merupakan paradigma yang menjadi salah satu syarat dalam mendukung keberhasilan pembangunan sektor pertanian.

### 3.1.1 Dinamika Lokal

Kondisi yang terkait erat dan mempengaruhi terhadap keberhasilan pembangunan sektor pertanian di wilayah Kota Tangerang Selatan diidentifikasi dan menjadi isu-isu strategis daerah, yaitu:

1. Kota Tangerang Selatan termasuk kategori rawan berdasarkan sistem kewaspadaan pangan daerah (SKPD), mengingat sangat rendahnya aspek produksi pangan berdasarkan sistem perhitungan SKPD dimaksud. Sedangkan aspek akses pangan dan pemanfaatan pangan secara umum berada pada level aman. Sumberdaya alam yang ada terutama lahan tidak mencukupi untuk mendukung ketahanan pangan Kota Tangerang Selatan secara mandiri sehingga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap wilayah sekitarnya maupun impor. Masuknya pangan dari wilayah lain dan impor juga memiliki resiko yang tinggi dari aspek keamanan pangan.
2. Sumberdaya Manusia (SDM), terbagi menjadi SDM pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan dan SDM masyarakat dan petani sebagai binaan dinas. SDM pegawai relatif baik terlihat dari tingkat pendidikan dan relevansi pendidikan dengan bidang pekerjaan. Namun tidak seluruh bidang pekerjaan terkait tupoksi ditangani personil yang sesuai dengan kompetensinya. SDM masyarakat dan petani binaan dinas sebagian besar masih menjadi kendala bagi keberhasilan pembangunan sektor pertanian di Kota Tangerang Selatan. Bukan hanya menyangkut aspek teknis namun juga terkait dengan persepsi,

seperti diketahui bahwa pertanian di wilayah perkotaan bersifat kontradiktif (pertanian biasanya di wilayah pedesaan dengan luas lahan yang relatif besar). Namun demikian beberapa petani modern yang telah maju dapat menjadi contoh yang baik bagi praktek pertanian di wilayah perkotaan baik dari aspek teknis maupun manajemen usaha. Dari sisi kuantitas terjadi penurunan jumlah petani/penduduk usia kerja yang bekerja di sektor pertanian secara signifikan setiap tahunnya.

3. Jumlah penduduk yang besar saat ini mencapai lebih dari 3,4 juta jiwa dan akan terus meningkat pesat mengingat tingginya angka pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk bukan hanya dari tingkat kelahiran bayi, namun juga dari urbanisasi mengingat kota memiliki daya tarik tinggi sebagai tempat mencari nafkah. Di satu sisi kebanyakan pelaku urbanisasi tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mencari nafkah di wilayah Kota Tangerang Selatan.
4. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan on farm, pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk pertanian belum optimal. Akses informasi dan ilmu pengetahuan serta pasar dapat menjadi pendorong bagi keberhasilan pembangunan sektor pertanian di Kota Tangerang Selatan.
5. Sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Kota Tangerang Selatan masih rendah, terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan di bawah 1%. Sektor pertanian dapat berperan dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Sektor perdagangan dan jasa yang terkait dengan sektor pertanian belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk kerjasama dengan pihak swasta dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

6. Pertanian di wilayah perkotaan dapat memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH**

VISI dan MISI sesungguhnya merupakan inti dari kehendak untuk mengintegrasikan seluruh sumberdaya bagi terwujudnya pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan manusia lahir dan batin dalam suatu kawasan administratif, dalam hal ini Kota Tangerang Selatan. Mengacu kepada konsep ini, visi dan misi berada pada pusaran cita-cita masa depan untuk diorientasikan kepada subyek pembangunan itu sendiri, yaitu: masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Bagi masyarakat, visi dan misi diorientasikan kepada pemberian aksesibilitas, pencapaian hasil pembangunan, pemerataan pendapatan dan menciptakan rasa aman. Bagi dunia usaha, visi dan misi diorientasikan kepada terciptanya jaminan dan kemudahan investasi serta kenyamanan usaha. Sedangkan bagi pemerintah sendiri, visi dan misi menjadi umpan balik yang dapat meningkatkan sumberdaya pembangunan khususnya keuangan daerah, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan dasar dan mampu menggali potensi sumber daya yang dimilikinya bagi peningkatan pendapatan daerah.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 adalah:

#### **“Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis Teknologi dan Inovasi”**

Visi kota cerdas Mengandung makna bahwa prinsip yang dikedepankan dan menjadi fondasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah adalah prinsip cerdas, yang mencerminkan konsep sistematis, efisiensi, efektifitas,

profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini kemudian akan diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun smart people, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living dan smart governance. Upaya dalam mewujudkan visi cerdas ini sejauh mungkin akan memaksimalkan manfaat aspek teknologi dan inovasi.

Visi kota berkualitas Memiliki arti bahwa yang ingin diwujudkan oleh semua stakeholder yang ada di wilayah adalah sebuah standar kualitas tertinggi dalam setiap aspek. Sumberdaya manusia yang kompeten, kondisi infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan, lingkungan yang ditata dengan mengedepankan prinsip berkesinambungan dan mendukung produktifitas warga, penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan kaidah-kaidah good governance, dan kehidupan sosial masyarakat yang madani dan mencerahkan, adalah batasan kualitas yang ingin dicapai. Dalam mencapai standar tersebut konsep pembangunan berbasis kewilayahan, inovasi dankolaborasi dari setiap elemen yang ada menjadi pilihan.

Berdaya saing Membawa pesan bahwa yang ingin dituju adalah sebuah kota yang memiliki berbagai keunggulan baik komparatif maupun kompetitif sehingga menjadi sebuah kawasan yang nyaman sebagai tempat hunian dan menarik untuk berinvestasi. Kota yang berdaya saing ini diterjemahkan melalui penyediaan transportasi publik yang baik, kondusifitas wilayah yang terjaga, daerah yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya industri kreatif dan UMKM yang berkembang, serta mekanisme pelayanan perijinan yang mencerminkan prinsip excellent service delivery. Inovasi adalah pintu utama untuk mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih dan berdaya saing.

Berbasis teknologi dan inovasi artinya untuk mewujudkan Kota Cerdas, berkualitas dan berdaya saing diupayakan dengan

memanfaatkan teknologi sebagai basis pendukung dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan system sistem, perumusan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut:

6. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
7. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
8. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
9. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
10. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Antara Visi dan Misi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dan saling terkait. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

**Misi pertama** : “Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing” ditujukan untuk meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya agar daya saingnya meningkat, serta mampu mendukung pencapaian tujuan SDGs menuju kota

yang maju dan sejahtera. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat miskin dengan harapan mampu menahan dan menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

**Misi kedua** : “Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional”, ditujukan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan aman dan nyaman.

**Misi ketiga** : “Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan”, ditujukan untuk Sarana dan prasarana wilayah mantap, transportasi memadai pemanfaatan ruang terkendali, ramah lingkungan dan menjadi sebuah kota yang tertata dan berkelanjutan.

**Misi keempat** : “Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan”, ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (*green economy*) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan daya saing dan

kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada sektor basis daerah akan menjadi pondasi perekonomian daerah, makin besarnya peranan usaha mikro, menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah yang berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan. Pada sisi yang lain pertumbuhan penduduk terkendali dan pemenuhan kebutuhan dasar serta timbulnya masalah-masalah sosial dapat terantisipasi dengan baik, sehingga rasa nyaman dan aman dapat tercipta yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

**Misi kelima** : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi”, ditujukan untuk Mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram. Dengan prioritas pembangunan yang tepat diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah. Tata kelola pemerintahan lebih profesional, modern, maju dan akuntabel, sehingga layanan terbaik kepada masyarakat mampu diberikan.

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROPINSI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, secara vertikal pada tingkat kementerian ada dua kementerian yang terkait yaitu Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada tingkat provinsi, Perangkat



Daerah Provinsi Banten yang terkait yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Tentunya tujuan dan saran strategis dari Renstra masing-masing kementerian dan SKPD Provinsi Banten terkait tidak seluruhnya berhubungan dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan mengingat kondisi fisik wilayah perkotaan yang spesifik.

### 3.3.1 Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Untuk mencapai misi tersebut telah ditetapkan misi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

5. Mewujudkan kedaulatan pangan
6. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
7. Mewujudkan kesejahteraan petani
8. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.



4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparaturnya pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula (penjabaran butir ke 7).
2. Peningkatan diversifikasi pangan (penjabaran butir ke 7).
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor (penjabaran butir ke 6).
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi (penjabaran butir ke 6).
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani (penjabaran butir ke 5).
6. Akuntabilitas kinerja aparaturnya pemerintah yang baik (penjabaran butir ke 2).

### 3.3.2 Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tercantum dalam Renstra tahun 2015-2019 adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Sedangkan misinya yaitu:

4. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

5. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
6. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya.
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan.
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP.
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif.

5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.
6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif,
7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian.
8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses.
9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel.

### 3.3.3 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten mempunyai visi tahun 2012-2017, yaitu: “Menjadi Institusi Yang Handal Menuju Mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dan Sistem Penyuluhan Yang Efektif Untuk Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera”.

Adapun misinya adalah sebagai berikut:

5. Pengembangan dan pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat berbasis kemandirian.
6. Pengembangan distribusi pangan dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan serta mengantisipasi kerawanan pangan.
7. Pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan dan kearifan lokal serta peningkatan mutu dan keamanan pangan.
8. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur serta peningkatan koordinasi dengan

stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan dan penyuluhan.

Tujuan yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan.
3. Mengembangkan sistim distribusi pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
4. Mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
5. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun ketahanan pangan dan penyuluhan.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Mempertahankan ketersediaan energy per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari.
2. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Banten sebesar 200 ton (setara beras), cadangan pangan pemerintah di 8 Kabupaten/kota sebesar 100 ton (setara beras) per kab/kota dan cadangan pangan masyarakat sebesar 807 ton (setara GKG).
3. Berkurangnya daerah rawan pangan di 8 Kabupaten/Kota (52 Kecamatan).
4. Stabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimal 10%.

5. Berkembangnya kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat (48 Gapoktan dan 38 Lumbung Pangan tahun 2017).
6. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.200 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor pola pangan harapan (PPH) mendekati 96 pada tahun 2017.
7. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 90 persen tahun 2017.
8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan dan penyuluhan di 8 Kabupaten/Kota.
9. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

#### 3.3.4 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten

Visi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah “Mewujudkan Pertanian dan Peternakan Yang Maju dan Tangguh Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Dalam rangka pencapaian Visi di atas, maka Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, menetapkan 4 (empat) Misi, yaitu:

5. Meningkatkan Optimaliasi Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Pertanian Dan Peternakan dalam mendukung Ketahanan Pangan melalui Pengembangan dan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Peternakan di Provinsi Banten.

6. Meningkatkan kemampuan peran kelembagaan petani dan Kelembagaan usaha agribisnis serta Kualitas SDM Aparatur Pertanian dan Peternakan.
7. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi berbasis komoditas dan sumber daya lokal dalam Meningkatkan produk pertanian dan peternakan yang mempunyai nilai tambah dan daya saing.
8. Membangun Semangat Kebersamaan Antar Pelaku Pembangunan Pertanian dan Sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selaras, serasi dan seimbang.

Adapun Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten yang ingin dicapai pada setiap misi adalah :

Misi 1 memiliki tujuan :

- Meningkatkan peran Infrastruktur Wilayah Pertanian dan Peternakan dalam mendukung Ketahanan Pangan Daerah
- Mempertahankan Tingkat Produksi Beras Dengan Ketersediaan Minimal 80 Persen Dari Kebutuhan Domestik,
- Meningkatnya Ketersediaan Pangan Baik Nabati Dan Hewani.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah

- Meningkatnya Potensi Kawasan Pertanian dan Peternakan
- Meningkatnya Fungsi dan Peran Infrastruktur Irigasi pertanian
- Meningkatnya Produksi Dan Ketersediaan Pangan Nabati Dan Hewani,
- Menguatnya Kelembagaan Perbenihan/Pembibitan Pertanian Dan Peternakan,
- Membaiknya Mekanisme Subsidi Pupuk,
- Membaiknya Sistem Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman Atau Penyakit Hewan,
- Menetapkan Standar Kualitas Dan Keamanan Pangan,

- Meningkatnya Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Pertanian Dan Peternakan.

Misi 2 memiliki tujuan :

- Mengembangkan Peran kelembagaan petani dan Kelembagaan usaha agribisnis Dan Penciptaan Lapangan Kerja Untuk Mendukung Agroindustri Pedesaan.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya Akses Petani Terhadap Sumber Daya Produktif Yang Berkelanjutan,
- Berkembangnya Lembaga Keuangan Pedesaan Dan Sistem Pendanaan Yang Layak Bagi Usaha Pertanian Dan Peternakan
- Menjamin Kredit Pertanian Komoditi Primer,
- Memberdayakan Petani Dan Kelompok Tani Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan,
- Meningkatnya Usaha Agribisnis Yang Meliputi Mata Rantai SubSektor Hulu (Pasar Pasokan Input), On Farm (Budidaya), Hilir (Pengolahan), Dan Jasa Penunjang,
- Meningkatnya Produktivitas, Mutu Produk Hortikultura Dan Ternak,
- Meningkatnya Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian Dan Peternakan,
- Berkembangnya Akses Informasi Pasar Dan Jaringan Pemasaran Bagi Produk Hortikultura Segar Dan Hasil Olahan Pertanian Dan Peternakan,
- Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian Dan Peternakan,
- Berkembangnya Dan Rehabilitasi Infrastruktur Penunjang Agribisnis Pertanian Dan Peternakan,
- Berkembangnya Pertanian Organik Komoditas Tanaman Hortikultura,



- Meningkatnya IPTEK Dan Pengembangan Kaji Terap Pertanian Dan Peternakan Teknologi Tepat Guna Spesifikasi Lokasi,
- Meningkatnya Peran Profesional Aparatur Pertanian dalam mendukung Agroindustri Banten.

Misi 3 memiliki tujuan :

- Meningkatkan ekonomi Produktif yang didukung oleh Komoditas pertanian dan Peternakan yang berdaya saing.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah:

- Berkembangnya pelaku usaha dan swasta yang produktif dalam rangka meningkatkan kualitas produk pertanian dan peternakan,
- Menumbuhkan Dan Memperkuat Lembaga usaha Pertanian,
- Memfasilitasi Pengembangan Kemitraan, Kerjasama,
- Mengembangkan Badan Usaha Milik Petani (BUMP),
- Menerapkan Sistem Kebersamaan Ekonomi.

Misi 3 memiliki tujuan :

- Terwujudnya Pelayanan Publik yang baik serta tercapainya Penerapan good governance.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah:

- Meningkatnya Peran Dan Fungsi SKPD Dinas Pertanian Dan Peternakan,
- Meningkatnya Penatausahaan Kelembagaan SKPD,
- Meningkatnya Sarana Dan Prasarana SKPD,
- Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Di Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik Melalui Dialog Dan Musyawarah Terbuka Dengan Komunitas Penduduk Di Masing-Masing Wilayah,



- Mengembangkan Mekanisme Pelaporan Berkala Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Kepada Publik,
- Menerapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bersih.

### 3.3.5 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten sebagai salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Provinsi Banten, dalam rangka melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan mendukung Misi ke-2 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yaitu Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat sehingga DKP mempunyai visi, yaitu: ” *Terwujudnya Usaha Kelautan Dan Perikanan Yang Maju dan Berdaya Saing Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*”

Di samping mempunyai visi dalam rangka melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tersebut diatas, juga mempunyai misi, yaitu :

5. Peningkatan mutu dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang berwibawa menuju tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan;
7. Pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sektor kelautan dan perikanan;
8. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Adapun tujuan yang tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten adalah:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan pelaku sektor kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah sektor kelautan dan perikanan.
4. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan

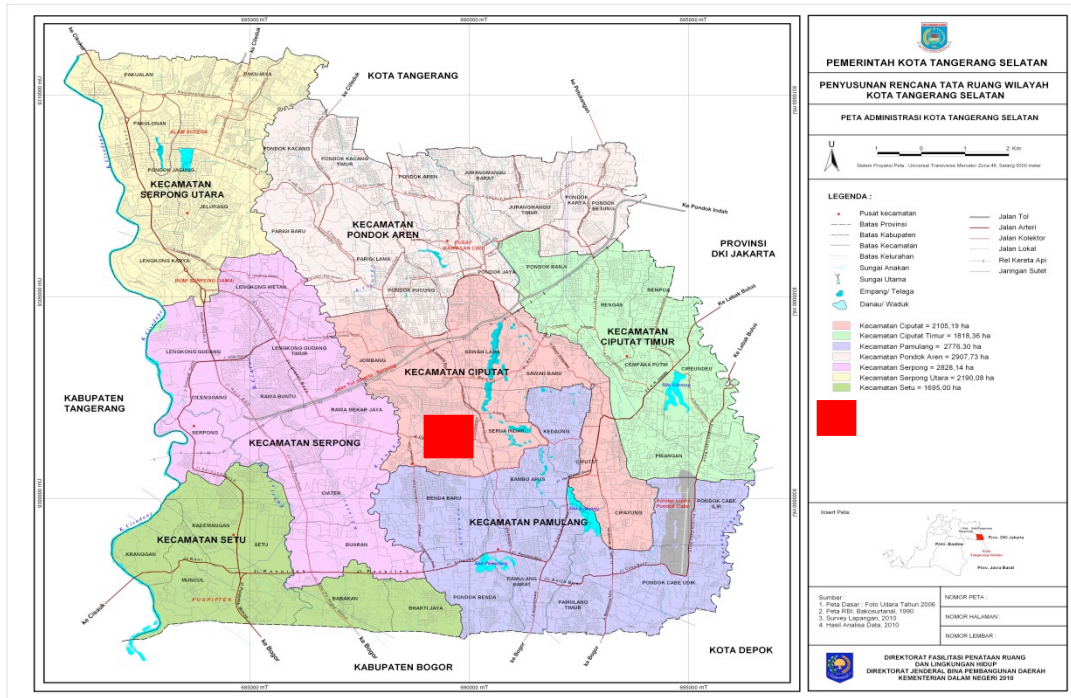
Adapun sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten adalah:

1. Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan.
3. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas, kinerja dan disiplin aparatur yang berbaris kompetensi.
5. Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
6. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan.
7. Meningkatnya aktifitas ekonomi berbasis potensi local
8. Meningkatnya luas wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing

### **3.4 TELAAHAN TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan**

Dalam kebijakan RTRWN, Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memposisikannya sebagai bagian dalam kota metropolitan Jabotabek, yaitu di Kecamatan Ciputat.



Gambar 3.2

Peta Rencana Sistem Perkotaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2030

Wilayah Pengembangan Kota (WPK) Kota Tangerang Selatan direncanakan dibagi menjadi 4 wilayah. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan pembagian ini adalah agar dicapai efisiensi dalam pembangunan kota sebagai implementasi dari RTRW.

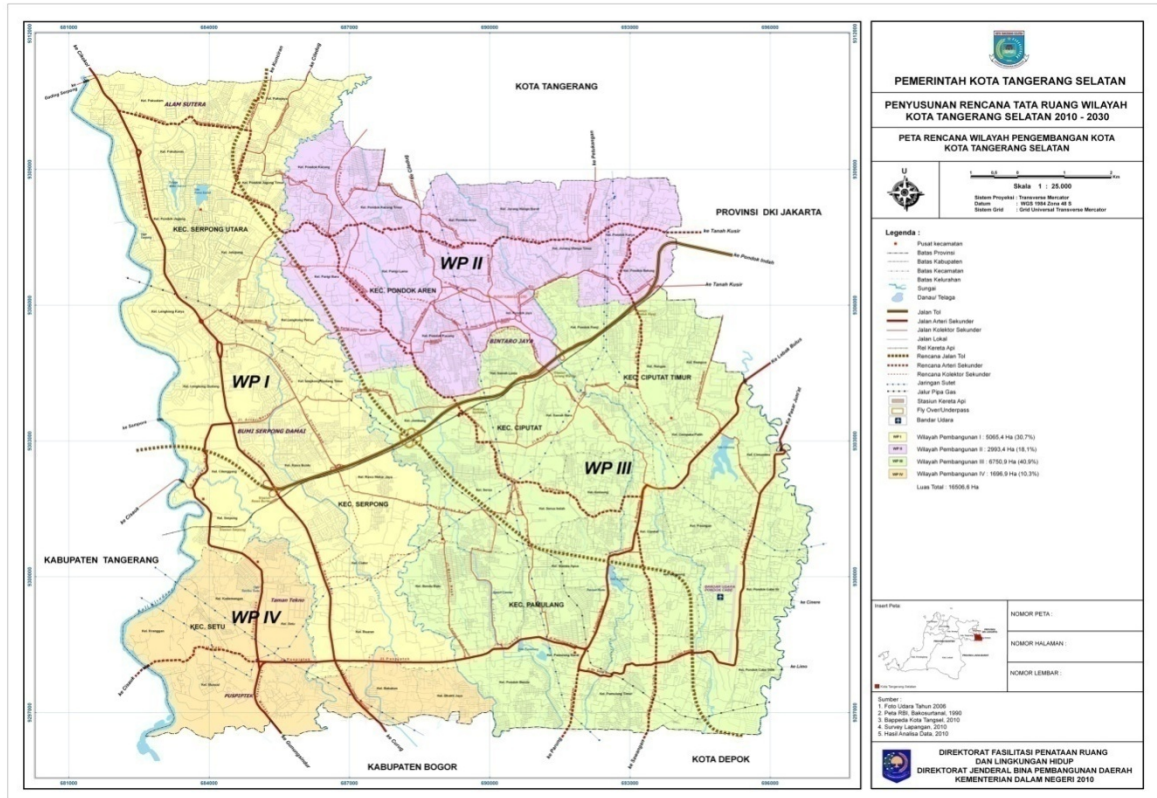
Adapun dasar pertimbangan dari penetapan WPK ini adalah batas administrasi, aksesibilitas dan kesamaan karakteristik pembangunan saat ini.

WPK I, meliputi: Kecamatan Serpong dan Serpong Utara.

WPK II, meliputi: Kecamatan Pondok Aren.

WPK III, meliputi: Kecamatan Pamulang, Ciputat dan Ciputat Timur.

WPK IV, meliputi: Kecamatan Setu.



Gambar 3.3  
Peta Wilayah Pengembangan Kota (WPK)  
Kota Tangerang Selatan Tahun 2030

Sedangkan pusat kota di Kota Tangerang Selatan ditetapkan 3 (tiga) jenis pusat kota dengan rincian sebagai berikut:

- Pusat pemerintahan
- Pusat perdagangan dan jasa
- Pusat pendidikan

Rincian penetapan masing-masing pusat kota tersebut dapat dirinci sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Pusat pemerintahan

Pusat pemerintahan di Kota tangerang Selatan terdiri dari:

- Pusat pemerintahan untuk skala pelayanan primer berada di Kecamatan Ciputat
- Pusat pemerintahan untuk skala pelayanan sekunder di Kecamatan Setu

- 3) Pusat pemerintahan untuk skala pelayanan tersier/lingkungan ada pada semua kantor kecamatan

b. Pusat perdagangan dan jasa

Pusat perdagangan dan jasa di Kota Tangerang Selatan terdiri dari:

- 1) Pusat perdagangan dan jasa untuk skala pelayanan primer berada di Kecamatan Serpong
- 2) Pusat perdagangan dan jasa untuk skala pelayanan sekunder di Kecamatan Serpong Utara
- 3) Pusat perdagangan dan jasa untuk skala pelayanan tersier/lingkungan ada pada semua kecamatan

c. Pusat pendidikan

d. Pusat pendidikan di Kota Tangerang Selatan terdiri dari:

- 1) Pusat pendidikan untuk skala pelayanan primer berada di Kecamatan Serpong dan Pamulang
- 2) Pusat pendidikan untuk skala pelayanan sekunder di Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur
- 3) Pusat pendidikan untuk skala pelayanan tersier/lingkungan ada pada semua kecamatan

Rincian lokasi dan fungsi masing-masing pusat kota dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Perincian Pusat-pusat Pelayanan di Kota Tangerang Selatan

SISTEM PUSAT KOTA	LOKASI ADMINISTRASI	LOKASI DETAIL	FUNGSI PUSAT PELAYANAN
<b>PUSAT PRIMER</b> <b>Perdagangan dan jasa</b>	<b>Kecamatan Serpong</b>	sepanjang koridor jl pahlawan seribu, kelurahan lengkong wetan	<b>Pelayanan ekonomi:</b> pusat perdagangan dan Jasa skala kota dan regional



SISTEM PUSAT KOTA	LOKASI ADMINISTRASI	LOKASI DETAIL	FUNGSI PUSAT PELAYANAN
<b>PUSAT PRIMER Pemerintahan</b>	Kecamatan Ciputat	Kelurahan Serua	<b>Pelayanan pemerintahan:</b> skala kota, Pusat pemerintahan Pemko dan instansi vertikal
<b>PUSAT PRIMER Pendidikan</b>	Kecamatan Serpong dan pamulang	Kelurahan Cilenggang	<b>Pelayanan pendidikan skala kota dan regional:</b> pendidikan menengah SMA dan pendidikan PT (bertaraf nasional dan internasional)
<b>PUSAT SEKUNDER Perdagangan dan jasa</b>	<b>Kecamatan Serpong Utara</b>	Kelurahan Paku Alam	<b>Pelayanan ekonomi:</b> pusat perdagangan dan Jasa skala kota
<b>PUSAT SEKUNDER Pemerintahan</b>	Kecamatan Setu	Lokasi di pertigaan Puspipetek hingga Perempatan Muncul, Kelurahan Muncul dan Setu	<b>Pelayanan pemerintahan:</b> skala kota, Pemko dan SKPD
<b>PUSAT SEKUNDER Pendidikan</b>	Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur	Kelurahan Ciputat dan Kelurahan Cirendeui	<b>Pelayanan pendidikan skala kota:</b> pendidikan menengah SMP, SMA, dan PT
<b>PUSAT TERSIER/LINGKUNGAN</b>	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Serpong utara	Lokasi di sekitar Perumahan Alam Sutra dan Melati Mas, Kelurahan Jelumpang dan Lengkong Karya	Melayani skala lokal, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pelayanan ekonomi;</b> pusat perdagangan lokal, perbelanjaan skala lokal dan pasar</li> </ul>
	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam	Lokasi disekitar Terminal BSD dan Pasar Modern BSD,	

SISTEM PUSAT KOTA	LOKASI ADMINISTRASI	LOKASI DETAIL	FUNGSI PUSAT PELAYANAN
	Kecamatan Serpong	Kelurahan Rawa Mekar Jaya	tradisional <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelayanan pendidikan;</b> pendidikan TK, SD dan pendidikan menengah</li> <li>• <b>Pelayanan moda transportasi</b> untuk melayani skala lokal</li> <li>• <b>Pelayanan pemerintahan:</b> skala kecamatan, kelurahan dan lokal/ lingkungan</li> </ul>
	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Pondok Aren	Lokasi disekitar perumahan Graha Bintaro dan Kantor Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Aren serta lokasi di sekitar Bintaro Plaza, kelurahan Pondok Karya	
	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Ciputat Timur	Lokasi disekitar kampus UIN dan Universitas Muhammadiyah, Kelurahan Cempaka Putih	
	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Ciputat	Lokasi disekitar Pasar Jombang, Kelurahan Jombang	
	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Pamulang	Lokasi di sekitar Situ Pamulang hingga bundaran Pamulang, Kelurahan Pamulang	
	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Setu	Lokasi di pertigaan Puspiptek hingga Perempatan Muncul, Kelurahan Muncul dan Setu	

### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dilakukan untuk mengintegrasikan konsep pengelolaan lingkungan hidup ke dalam kerangka kebijakan strategis Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan telaahan terhadap permasalahan pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, telaahan RTRW Kota Tangerang Selatan dapat disampaikan beberapa kesimpulan berikut ini.

#### a. Konsepsi Penyusunan KLHS

Konsepsi penyusunan KLHS Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan adalah pendekatan instrumental dan transformatif, dengan tujuan utama sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari kebijakan, rencana, program untuk proses pengambilan keputusan.
- 2) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, atau program.
- 3) Memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana, dan program.
- 4) Memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.

#### b. Aspek Fisik Lingkungan

- (1) Fisiografi Kota Tangerang Selatan yang didominasi oleh dataran rendah dengan morfologi yang relatif datar serta dominasi lahan terbangun hampir diseluruh penjuru kota



sehingga rentan terhadap genangan, menjadi kendala fisik pemanfaatan lahan ke depannya yang harus disikapi dengan arif.

- (2) Dataran rendah dengan morfologi yang relatif datar memiliki banyak cekungan tempat genangan air secara alami. Pembangunan yang tidak terkendali disekitarnya dan kawasan yang dekat dengan sungai berpotensi menimbulkan banjir setempat atau dalam skala luas.
- (3) Pemanfaatan ruang dan pembangunan fisik yang tidak berkesesuaian dengan pola aliran dan genetika sistem sungai di Kota Tangerang Selatan, di dalam kurun waktu jangka panjang, akan mengakibatkan dampak kumulatif yang menimbulkan bencana.
- (4) Perubahan iklim global yang juga mengakibatkan berubahnya pola hujan dan meningkatnya kuantitas curah hujan selanjutnya akan menimbulkan kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi.
- (5) Peningkatan intensitas pembangunan fisik di sekitar Sungai Cisadane, Sungai Angke dan Sungai Pesanggrahan yang diikuti dengan peningkatan aktifitas perkotaan akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang kumulatif, sehingga Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategisnya perlu dipersiapkan lebih cermat.

c. Keselarasan Muatan Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang terhadap Lingkungan Hidup.

- (1) Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, yang disusun berpedoman pada UU No.25/2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memuat diskripsi kebijakan dan strategi

- (2) Rumusan kebijakan Visi, Misi dan Rencana Program Walikota Terpilih, Rencana Strategis Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Hasil analisis isi (*content analysis*) antar dokumen disimpulkan sebagai berikut:

- a) Tentang Visi dan Misi Walikota Tangerang Selatan :

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan disusun guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Kota Tangerang Selatan terpilih yang terkait dengan misi ke 5, yaitu “Meningkatkan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa”.

- b) Tentang Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan telah sejalan dengan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

- c) Tentang Tujuan RTRW :

- mewujudkan Kota Tangsel sebagai kawasan permukiman di Jabodetabekpunjur, yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan (*liveable city*);
- mewujudkan penyelenggaraan fungsi-fungsi perekonomian (perdagangan dan jasa) dan pendidikan berskala internasional, nasional dan lokal.

Tujuan pertama menunjukkan perhatian yang besar pada kondisi dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam konteks interdependensi, rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan telah menggambarkan keterkaitan antara visi dan misi Walikota terpilih dan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

### 3.5 ISU STRATEGIS

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan adalah:

1. Keterbatasan sumberdaya, berupa sumberdaya lahan maupun sumberdaya manusia. Sebagian besar lahan digunakan untuk sektor permukiman, dan sangat sedikit penduduk yang bekerja di sektor pertanian.
2. Persepsi kontradiktif antara sektor pertanian dan wilayah perkotaan, dimana sektor pertanian biasanya dikembangkan di wilayah pedesaan.
3. Ketahanan pangan, dipandang dari perspektif kemandirian dan kedaulatan pangan. Ketergantungan pangan dari luar wilayah Kota Tangerang Selatan sangat tinggi, sangat beresiko

terhadap konsumsi pangan yang tidak aman dari bahan pengawet maupun pestisida.

4. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kota Tangerang Selatan sangat rendah.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan mengacu kepada visi Kota Tangerang Selatan yang tercantum dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis Teknologi dan Inovasi”**.

Adapun misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 yaitu:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan mendukung kepada misi ke-4 yaitu **“Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan”**.

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan

secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Dalam rangka merealisasikan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, maka tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

### **Tujuan**

- a. Meningkatkan Ketahanan Pangan, dengan fokus sasaran sebagai berikut:

#### **Sasaran :**

- Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH).
- b. Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha di sektor pertanian, dengan fokus sasaran sebagai berikut :

#### **Sasaran :**

- Meningkatnya pendapatan petani dan peternak/pelaku usaha pertanian dan peternakan.
  - Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan.
- c. Meningkatkan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, dengan fokus sasaran sebagai berikut :

#### **Sasaran :**

- Meningkatnya kesehatan hewan.
  - Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian perkotaan, dengan fokus sasaran sebagai berikut :

**Sasaran :**

- Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kawasan pertanian terpadu.



Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH	83%	85%	87%	89%	91%	92%	93%
2.	Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha di sektor pertanian	Meningkatnya pendapatan petani dan peternak/pelaku usaha pertanian dan peternakan	Peningkatan pendapatan petani dan peternak/pelaku usaha pertanian dan peternakan	-	6%	8%	10%	12%	14%	16%
		Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan	Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan	-	6%	8%	10%	12%	14%	16%
3.	Meningkatkan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Meningkatnya kesehatan hewan.	Presentase Kesehatan Hewan	78%	79%	80%	81%	82%	83%	84%
		Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner	Presentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH	76%	77%	78%	79%	80%	81%	82%
4.	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian perkotaan	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kawasan pertanian terpadu	Penambahan Sarana Prasarana Kawasan Pertanian Terpadu	0%	0%	0%	10%	20%	30%	40%



## **4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.2.1 Analisis SWOT**

Berdasarkan hasil analisis lingkungan, ada beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Beberapa faktor eksternal merupakan peluang (opportunity) dan beberapa faktor merupakan ancaman (threat).

Faktor-faktor eksternal yang termasuk sebagai peluang adalah:

1. Letak Kota Tangerang Selatan yang sangat strategis, termasuk dalam kawasan strategis nasional Jabodetabekpunjur. Termasuk juga dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan kedekatan pasar di wilayah Kota Tangerang Selatan berpengaruh terhadap komponen biaya transportasi menjadi murah, sehingga pelaku usaha sektor pertanian di Kota Tangerang Selatan dapat menerima hasil yang relatif lebih baik.
2. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak cara untuk mengatasi keterbatasan lahan dengan melaksanakan praktek pertanian modern. Kerjasama dengan pihak Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) dalam rangka alih teknologi juga belum berjalan secara optimal. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan pada peningkatan nilai tambah (kegiatan pengolahan dan pemasaran) selain kegiatan budidaya.
3. Peran dan komitmen swasta dan masyarakat dalam mengembangkan pertanian perkotaan. Di Kota Tangerang Selatan banyak terdapat perusahaan-perusahaan dan pengembang-pengembang besar yang dapat mendorong

praktek-praktek pertanian perkotaan melalui dana CSR (*corporate social responsibility*) maupun penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk pemanfaatan lahan terbuka hijau. Selain itu ada juga sebagian masyarakat Kota Tangerang Selatan terutama yang telah berhasil menjalankan usahanya di sektor pertanian turut serta memberikan bimbingan kepada lingkungannya atau masyarakat lainnya yang memiliki minat yang sama.

4. Mengintegrasikan pertanian perkotaan dengan sektor atau bidang lainnya. Pengalaman beberapa kota di dunia yang telah berhasil mengembangkan pertanian perkotaan, mengintegrasikan praktek pertanian perkotaan dengan sektor lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. Pertanian perkotaan di Kota Tangerang Selatan juga dapat diarahkan untuk terintegrasi dengan sektor lainnya.
5. Budaya pertanian di masyarakat Kota Tangerang Selatan sampai dengan saat ini masih berlangsung. Sebagai bagian dari Bangsa Indonesia yang memiliki budaya agraris yang kuat, sebagian masyarakat Kota Tangerang Selatan juga masih banyak yang terus melakukan budidaya pertanian baik sebagai mata pencarian (sumber penghasilan) maupun sebagai penyaluran hobi atau kesenangan.
6. Pertanian perkotaan memiliki fungsi ganda berdasarkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pertanian perkotaan dapat menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang biasa di hadapi masyarakat perkotaan.

Sedangkan faktor-faktor eksternal yang merupakan ancaman adalah :

1. Pemanfaatan ruang yang tidak berpihak kepada pengembangan sektor pertanian berdampak terhadap ketersediaan lahan pertanian yang semakin sempit. Saat ini

belum ada data pasti berapa laju alih fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian. RTRW Kota Tangerang Selatan tidak mengatur secara detail berapa luas dan lokasi lahan pertanian yang harus dipertahankan. Semakin banyak lahan pertanian yang berubah fungsi terutama untuk pemukiman, termasuk di antaranya lahan masyarakat yang telah beralih kepemilikannya kepada para pengembang. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan sistem waris yang berlangsung di masyarakat juga berdampak terhadap semakin berkurangnya lahan pertanian. Berdasarkan data tahun 2008 luas lahan pertanian hanya seluas 2.794,41 ha (18,99% dari luas Kota Tangerang Selatan).

2. Daya tarik sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan rendah akibat dari rendahnya aktivitas usaha di sektor pertanian. Data pembentukan PDRB menunjukkan sektor pertanian bukan merupakan sektor dominan bagi perekonomian Kota Tangerang Selatan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011 sangat kecil, hanya sebesar 0,86%. Sektor pertanian merupakan sektor pendukung ekonomi suatu daerah, kontribusi yang kecil dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengabaikan atau tidak mengalokasikan sumberdayanya termasuk sumberdaya keuangan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya.
3. Ketersediaan SDM masyarakat pertanian perkotaan tidak memadai dan cenderung menurun. Terjadi penurunan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian di mana pada tahun 2010 berjumlah 6.255 orang (1,11%) menjadi 5.591 (0,95%). Pekerjaan di sektor pertanian untuk wilayah perkotaan semakin tidak populer, mata pencarian di kota identik dengan sektor jasa dan teknologi modern. Faktor-faktor lainnya juga ikut

mempengaruhi ketersediaan SDM pertanian, terutama menyangkut ketersediaan lahan.

4. Kualitas SDM masyarakat pertanian di Kota Tangerang Selatan umumnya masih rendah. Pengetahuan dan keterampilan petani atau pelaku usaha pertanian di Kota Tangerang Selatan dalam melakukan budidaya, pengolahan sampai pemasaran hasil pertanian umumnya masih rendah. Praktek pertanian yang dijalankan masih cenderung tradisional. Beberapa pelaku usaha pertanian perkotaan merupakan SDM yang berkualitas dan telah menggunakan teknologi yang mutakhir dan telah memanfaatkan pasar global.
5. Ketergantungan pangan dari luar wilayah (termasuk impor sangat tinggi, produk pertanian khususnya pangan memiliki sifat mudah rusak (*perishable*) sehingga rentan penggunaan pengawet kimia. Produk pangan secara masal juga mendorong penggunaan pestisida kimia yang berbahaya bagi kesehatan dalam jangka panjang.
6. Perubahan iklim dan anomali iklim yang terjadi saat ini berpengaruh terhadap kegiatan budidaya pertanian terutama menyangkut jadwal tanam dan dampaknya berupa hasil panen yang tidak sesuai harapan. Perubahan iklim juga berdampak terhadap timbulnya serangan hama dan penyakit.

Hasil identifikasi faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan terdapat beberapa faktor internal yang merupakan kekuatan (*strenght*) dan beberapa faktor merupakan kelemahan (*weakness*). Adapun faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan adalah :

1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan SKPD yang memiliki tupoksi dalam

penyelenggaraan urusan pangan, urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

2. Ketahanan pangan sebagai salah satu fokus rencana pembangunan dalam RPJMD. Dalam Bab III RPJMD Kota Tangerang Selatan disebutkan salah satu tujuan pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 adalah meningkatnya ketahanan pangan. Peningkatan ketahanan pangan diantaranya dilakukan melalui praktek pertanian perkotaan.
3. Dukungan anggaran yang cukup memadai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2010 anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perikanan (sekarang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan) sebesar Rp. 6.286.538.590,68 (belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.287.038.590,68 dan belanja langsung sebesar Rp. 3.999.500.000). Anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2011 sebesar Rp. 13.739.478.872,51 (terdiri dari Rp. 4.412.960.984,51 dan Rp. 9.326.517.888 untuk belanja langsung), sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 15.311.644.084,58 (belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.491.809.084,58 dan belanja langsung sebesar Rp. 10.819.835.000). Belanja tidak langsung merupakan belanja gaji dan tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya, sedangkan belanja langsung adalah belanja untuk menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan dinas. Anggaran belanja tersebut di luar anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD Provinsi.

4. Komitmen kepala daerah terhadap pertanian perkotaan cukup tinggi. Kepala daerah memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan anggaran serta program dan kegiatan prioritas.
5. BPP Jombang dan Kawasan Pertanian Terpadu berpotensi sebagai pusat pelayanan pelatihan, percontohan dan pengembangan bibit unggul.

Sedangkan faktor-faktor internal yang merupakan kelemahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan dalam upaya mencapai visi dan misinya adalah:

1. Kurangnya memadainya sarana dan prasarana sektor pertanian di Kota Tangerang Selatan. Sarana dan prasarana mulai dari kegiatan budidaya (*on farm*) sampai dengan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian belum cukup dalam mendukung pengembangan pertanian perkotaan. baik sarana dan prasarana yang ada di masyarakat maupun aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
2. Ketersediaan dan kualitas SDM yang membidangi pertanian perkotaan tidak mencukupi. Jumlah penyuluh pertanian/tenaga teknis lapangan tidak mencukupi dan jumlah pegawai khususnya yang menduduki jabatan yang memiliki latar belakang pendidikan maupun pengalaman kerja di sektor pertanian masih kurang. Selain itu kepedulian (*awareness*), wawasan dan kemampuan teknis akan praktek-praktek pertanian perkotaan masih kurang.
3. Kurangnya regulasi yang mendukung pertanian perkotaan. Perda/Perwal sangat penting bagi landasan hukum akan keberlangsungan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pertanian perkotaan baik yang dibiayai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun dana masyarakat.

#### 4.2.2 Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis secara efektif dan efisien. Perumusan Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2020 dirumuskan berdasarkan matriks berikut :

Matriks SO Strategy (Memanfaatkan kekuatan/strenght untuk meraih peluang/opportunity)

	<i>Opportunity</i> 1. Letak strategis 2. Pemanfaatan IPTEK 3. Peran dan komitmen swasta dan masyarakat 4. Integrasi dengan sektor/bidang lainnya 5. Budaya masyarakat 6. Multifungsi pertanian kota
<i>Strenght</i> 1. Tupoksi DPKP 2. RPJMD 3. Dukungan anggaran 4. Komitmen Kepala Daerah 5. Keberadaan BPP Jombang dan Kawasan Pertanian Terpadu	<i>SO Strategy</i> 1. Menjadikan Kota Tangsel sebagai sentra pengolahan dan pemasaran produk pertanian 2. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan PT 3. Mengembangkan sistem magang 4. Mengintegrasikan pertanian dengan sektor kesehatan, pariwisata, pendidikan dll 5. Menjadikan pertanian sebagai gerakan masal 6. Sektor pertanian menjadi bagian



	dari rencana wilayah
--	----------------------

Matriks ST Strategy (Memanfaatkan kekuatan/strenght untuk menghadapi ancaman/threat)

	<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemanfaatan tata ruang tidak berfihak kepada sektor pertanian</li> <li>2) Kontribusi terhadap PDRB rendah</li> <li>3) Jumlah petani terus menurun</li> <li>4) Kualitas SDM relatif rendah</li> <li>5) Ketergantungan pangan dari luar wilayah sangat tinggi</li> <li>6) Perubahan/anomali iklim</li> </ol>
<p><i>Strenght</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tupoksi DPKP</li> <li>2. RPJMD</li> <li>3. Dukungan anggaran</li> <li>4. Komitmen Kepala Daerah</li> <li>5. Keberadaan BPP Jombang dan Kawasan Pertanian Terpadu</li> </ol>	<p><i>ST Strategy</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan lahan pekarangan, fasos-fasum dan sepadan secara masiv</li> <li>2. Fokus kepada peningkatan daya saing produk olahan dan jasa</li> <li>3. Pemilihan komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi</li> <li>4. Perbaikan manajemen usaha tani dan fokus terhadap komoditas bernilai ekonomis tinggi</li> <li>5. Sosialisasi, pelatihan dan magang</li> <li>6. Peningkatan aspek legal (perda/perwal)</li> <li>7. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>8. Memfungsikan BPP Jombang dan Kawasan Pertanian Terpadu sebagai UPTD pusat pendidikan, pelatihan dan percontohan pertanian perkotaan</li> </ol>

Matriks WO Strategy (Mengatasi kelemahan/weakness untuk meraih peluang/opportunity)



	<p><i>Opportunity</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letak strategis</li> <li>2. Pemanfaatan IPTEK</li> <li>3. Peran dan komitmen swasta dan masyarakat</li> <li>4. Integrasi dengan sektor/bidang lainnya</li> <li>5. Budaya masyarakat</li> <li>6. Multifungsi pertanian kota</li> </ol>
<p><i>Weakness</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sarana</li> <li>2. SDM penyuluh dan tenaga teknis lapangan</li> <li>3. Kurangnya regulasi yang mendukung pertanian perkotaan</li> </ol>	<p><i>WO Strategy</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan/pembangunan sentra pemasaran produk pertanian</li> <li>2. Rekrutmen dan Diklat tenaga teknis penyuluh dan petugas teknis lapangan</li> <li>3. Penyusunan regulasi</li> </ol>

Matriks WT Strategy (Mengatasi kelemahan/weakness untuk menghadapi ancaman/threat)

	<p><i>Threat</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemanfaatan tata ruang tidak berfihak kepada sektor pertanian</li> <li>2) Kontribusi terhadap PDRB rendah</li> <li>3) Jumlah petani terus menurun</li> <li>4) Kualitas SDM relatif rendah</li> <li>5) Ketergantungan pangan dari luar wilayah sangat tinggi</li> <li>6) Perubahan/anomali iklim</li> </ol>
<p><i>Weakness</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya sarana</li> <li>2) SDM penyuluh dan tenaga teknis lapangan</li> <li>3) Kurangnya regulasi yang mendukung pertanian perkotaan</li> </ol>	<p><i>WT Strategy</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana</li> <li>2. Pembangunan demplot pertanian perkotaan</li> <li>3. Memfungsikan BPP Jombang dan Kawasan Pertanian Terpadu</li> <li>4. Diklat tenaga teknis penyuluh dan petugas teknis lapangan</li> </ol>

	5. Penyusunan regulasi
--	------------------------

#### 4.2.3 Kebijakan

Secara umum kebijakan pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan di Kota Tangerang Selatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat pertanian, peternakan dan perikanan selain meningkatkan pelayanan publik di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Kebijakan-kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan mendukung misi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Melibatkan seluruh stakeholders di Kota Tangerang Selatan untuk berperan dalam pembangunan pertanian perkotaan di Kota Tangerang Selatan dan menjadikan pertanian perkotaan sebagai gerakan masal.
- b. Memfungsikan BPP Jombang dan Kawasan Pertanian Terpadu sebagai UPTD pusat pendidikan, pelatihan dan percontohan pertanian perkotaan.
- c. Fokus pengembangan produk bernilai ekonomis tinggi serta peningkatan nilai tambah produk dan jasa.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
- e. Meningkatkan pelayanan di sektor pertanian kepada masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai sasaran dari setiap tujuan yang telah ditetapkan serta mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 diperlukan penetapan program prioritas yang menjawab isu strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Isu strategis merupakan resume dari faktor-faktor internal dan eksternal.

Program prioritas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

#### **A. Urusan Ketahanan Pangan (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar)**

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

#### **B. Urusan Perikanan (Urusan Pilihan)**

1. Program Pengembangan Perikanan.

#### **C. Urusan Pertanian (Urusan Pilihan)**

1. Program Pengembangan Pertanian.
2. Program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu.

Selain itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan juga melaksanakan urusan penunjang di setiap OPD.

Berdasarkan daftar program prioritas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan tersebut

di atas, selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, indikator keberhasilan kegiatan, serta rencana capaian kinerja dan kebutuhan dana. Lebih lanjut uraian tersebut dapat di lihat dalam matriks berikut :

## **BAB VI.**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Baik Renstra SKPD maupun RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Penyusunan Renstra SKPD mengacu kepada draft RPJMD, dengan demikian antara Renstra SKPD dan RPJMD saling terkait. Perbedaan antara Renstra SKPD dan RPJMD terletak pada cakupan urusan dinas dan daerah serta Renstra SKPD menjabarkan RPJMD secara lebih detail, sampai kepada rencana kegiatan tahunan.

Renstra SKPD menjabarkan peran SKPD dalam menyikapi atau menyelesaikan beberapa isu strategis daerah sesuai dengan Tupoksinya yang tercantum dalam RPJMD. Berdasarkan analisa faktor-faktor internal dan eksternal, keterkaitan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan dapat terlihat dalam matriks berikut :

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektor pertanian di Kota Tangerang Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang juga menjabarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Dokumen Renstra akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan di Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021 yang sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan Kota Tangerang Selatan selama lima tahun mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, dunia usaha, akademisi, perguruan tinggi, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Pusat serta SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan).

Dengan pencapaian visi pembangunan jangka menengah 2016-2021 yaitu Terwujudnya Tangerang Selatan Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya saing berbasis Teknologi dan Inovasi, diharapkan cita-cita seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang sejahtera dapat terwujud.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN**



**DRS. H. DADANG RAHARJA, MM**  
**NIP. 19631113 198501 1 001**